

# MOZAIK

## PERGERAKAN NASIONAL

Ragam Ideologi dan Organisasi Menuju  
Indonesia Merdeka  
(1908-1955)



# **MOZAIK PERGERAKAN NASIONAL**

**Ragam Ideologi dan Organisasi  
Menuju Indonesia Merdeka (1908-1955)**

# **MOZAIK PERGERAKAN NASIONAL**

## **Ragam Ideologi dan Organisasi**

### **Menuju Indonesia Merdeka (1908-1955)**

---

**Yadi Kusmayadi, M.Pd.**  
**Dkk**



# **MOZAIK PERGERAKAN NASIONAL**

## **Ragam Ideologi dan Organisasi**

### **Menuju Indonesia Merdeka (1908-1955)**

---

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:  
**Yadi Kusmayadi, M.Pd.**  
**Dkk (Terlampir)**

Editor: Rusli

Terbitan: Januari 2026

Cover: Tim Kreatif PRCI

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2026, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151  
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: [www.rcipress.rcipublisher.org](http://www.rcipress.rcipublisher.org)  
E-mail: [rumahcemerlangindonesia@gmail.com](mailto:rumahcemerlangindonesia@gmail.com)

Copyright © 2026 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia  
All Right Reserved

- Cet. I -: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2026  
Dimensi : 18,2 x 25,7 cm

**ISBN 978-634-239-305-5**

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan  
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang  
**Hak Cipta Pasal 72**

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## KATA PENGANTAR

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia bukanlah kisah yang berjalan dalam satu garis lurus, apalagi digerakkan oleh satu kekuatan tunggal. Ia hadir sebagai mozaik—tersusun dari kepingan gagasan, organisasi, tokoh, dan ideologi yang beragam, saling berinteraksi, berdebat, bahkan berseberangan, namun pada akhirnya bertemu pada satu tujuan bersama: Indonesia Merdeka.

Buku *Mozaik Pergerakan Nasional: Ragam Ideologi dan Organisasi Menuju Indonesia Merdeka (1908–1955)* disusun untuk menghadirkan kembali dinamika tersebut secara utuh dan proporsional. Rentang waktu yang dibahas, sejak lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 hingga masa awal konsolidasi negara pascakemerdekaan, merupakan periode krusial dalam pembentukan kesadaran nasional Indonesia. Pada masa inilah tumbuh dan berkembang berbagai organisasi pergerakan—nasionalis, Islam, sosialis, hingga komunis—dengan latar belakang pemikiran, strategi, dan pendekatan perjuangan yang berbeda-beda.

Melalui buku ini, pembaca diajak memahami bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari satu ideologi yang paling benar, melainkan buah dari proses panjang dialog, kompromi, dan kerja kolektif berbagai elemen bangsa. Perbedaan pandangan yang muncul dalam tubuh pergerakan nasional justru menjadi sumber kekayaan intelektual dan politik, yang membentuk karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan demokratis.

Penyajian materi dalam buku ini diupayakan agar tidak hanya informatif, tetapi juga reflektif. Sejarah tidak sekadar dihadirkan sebagai deretan peristiwa dan tanggal, melainkan sebagai ruang belajar untuk memahami tantangan kebangsaan masa kini. Dengan mengenali dinamika pergerakan nasional di masa lalu, diharapkan pembaca dapat menumbuhkan sikap kritis, toleran, dan menghargai perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Januari 2026

Penulis



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I SAREKAT ISLAM DAN LAHIRNYA PERGERAKAN NASIONAL (1911–1920)...	1
A. Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam, dan Sarekat Rakyat.....	2
B. Peran Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam dan Sarekat Rakyat dalam Pergerakan Nasional .....	3
C. Pergerakan Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam dan Sarekat Rakyat.....	5
D. Pengaruh Organisasi Sarekat Islam,Sarekat Dagang Islam,Sarekat Rakyat Terhadap Kebangkitan Nasional dan Kemerdekaan Indonesia.....	6
E. Tokoh-Tokoh Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam, dan Sarekat Rakyat.....	8
F. Rangkuman .....	11
BAB 2 BUDI UTOMO DAN AWAL KEBANGKITAN NASIONAL (1908).....	13
A. Boedi Oetomo.....	14
B. Strategi Perjuangan Boedi Utomo dalam Membangun Kesadaran Nasional .....	21
C. Peran Boedi Utomo dalam Proses Kebangkitan Nasional dan Pembentukan Identitas Kebangsaan Indonesia.....	25
D. Rangkuman .....	27
BAB 3 PKI DAN PERGOLAKAN PERGERAKAN NASIONAL (1926–1927).....	29
A. PKI dan perkembangan Ideologi Komunisme di Indonesia.....	30
B. Faktor Penyebab Pemberontakan PKI Pada Masa Pergerakan Nasional....	34
C. Dampak Pemberontakan PKI 1926-1927.....	36
D. Rangkuman .....	37
BAB 4 NU DAN MUHAMMADIYAH DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA (1912–1945).....	39
A. Nahdlatul Ulama.....	40
B. Organisasi Masyarakat Muhammadiyah.....	45
C. Rangkuman .....	48
BAB 5 PNI DAN PERJALANAN PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA (1927–1955) .....	49



A. Partai Nasional Indonesia.....	52
B. Ideologi dan Tujuan Perjuangan PNI.....	55
C. Peran PNI dalam Pergerakan Nasional Indonesia .....	57
D. Dampak PNI terhadap Perjuangan Kemerdekaan.....	59
E. Rangkuman .....	62
<b>BAB 6 INDISCHE VEREENIGING DAN TUMBUHNYA KESADARAN NASIONALISME INDONESIA (1908-1925).....</b>	<b>63</b>
A. Indische Vereeniging.....	66
B. Peran <i>Indische Vereeniging</i> Dalam Membentuk Kesadaran Nasionalisme Indonesia.....	69
C. Dampak Keberadaan <i>Indische Vereeniging</i> Terhadap Pergerakan Nasional.....	71
D. Rangkuman .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>





# **SELAMAT MEMBACA**

SALAM LITERASI



# BAB I

## SAREKAT ISLAM DAN LAHIRNYA PERGERAKAN NASIONAL (1911-1920)

*Riska Sintia, Pani Silviani, Fikri Faisal Aditya*

Pergerakan nasional Indonesia pada awal abad ke-20 ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi modern yang berperan penting dalam membangkitkan kesadaran nasional rakyat Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga berkembang menjadi kekuatan sosial dan politik yang menentang penindasan kolonial Belanda. Salah satu organisasi yang memiliki peranan besar dalam proses ini adalah Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, dan Sarekat Rakyat (Aditya, 2011).

Awalnya, Sarekat Dagang Islam didirikan oleh Haji Samanhudi tahun 1911 di Surakarta, dengan tujuan utama melindungi para pedagang pribumi, khususnya pedagang batik, dari dominasi dan monopoli pedagang Tionghoa. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran politik dan nasionalisme, organisasi ini mengalami perkembangan yang signifikan. Di bawah pengaruh tokoh-tokoh seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam (SI) pada 1912 dan bertransformasi dari organisasi ekonomi menjadi organisasi politik yang memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia.

Sarekat Islam menjadi wadah besar bagi rakyat untuk bersatu melawan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Melalui kegiatan dan pengaruhnya, Sarekat Islam berhasil menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme di berbagai lapisan masyarakat. Namun, dinamika internal dan perbedaan ideologi di dalam tubuh organisasi akhirnya melahirkan perpecahan, yang kemudian memunculkan kelompok baru seperti Sarekat Rakyat.

Sarekat Rakyat merupakan cabang yang dipengaruhi oleh paham kiri dan berhaluan radikal. Organisasi ini menjadi wadah bagi kaum buruh dan tani yang berorientasi pada perjuangan kelas. Munculnya Sarekat Rakyat menunjukkan adanya pergeseran arah perjuangan sebagian anggota Sarekat Islam yang merasa bahwa perjuangan politik harus diiringi dengan perubahan sosial-ekonomi yang lebih mendasar.

Dengan demikian, pembahasan mengenai Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam, dan Sarekat Rakyat menjadi penting untuk memahami proses tumbuhnya kesadaran nasional, dinamika politik awal abad ke-20, serta perkembangan ideologi dan



strategi perjuangan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Kajian terhadap ketiga organisasi ini juga memberikan gambaran bagaimana perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan melalui jalur kekerasan, tetapi juga melalui pembentukan organisasi sosial, ekonomi, dan politik yang berperan sebagai cikal bakal gerakan nasional modern.

## **A. Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam, dan Sarekat Rakyat**

---

Pada awal abad ke-20, kehidupan rakyat Indonesia berada dalam kondisi yang sulit akibat tekanan ekonomi, sosial, dan politik dari pemerintahan kolonial Belanda. Kaum pribumi, terutama pedagang kecil, mengalami kesulitan bersaing dengan pedagang asing yang mendapat perlindungan dari pemerintah kolonial. Dalam situasi tersebut, muncul kesadaran untuk membentuk organisasi yang dapat melindungi kepentingan ekonomi umat Islam dan rakyat pribumi. Dari kesadaran inilah lahir Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1911 di Surakarta yang dipelopori oleh Haji Samanhudi. Tujuan utama SDI adalah melindungi pedagang Islam dari dominasi pedagang Tionghoa serta memperkuat solidaritas ekonomi di antara umat Islam.

Perkembangan Sarekat Dagang Islam sangat pesat dan mendapat sambutan luas dari masyarakat. Seiring bertambahnya anggota dan meluasnya pengaruh organisasi, muncul kebutuhan untuk memperluas perjuangan, tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga sosial dan politik. Atas gagasan H.O.S. Tjokroaminoto, pada tahun 1912 organisasi ini diubah menjadi Sarekat Islam (SI). Pergantian nama tersebut menandai perubahan arah perjuangan dari ekonomi menuju perjuangan kebangsaan dan keagamaan. Sarekat Islam menjadi wadah bagi rakyat Indonesia untuk memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, serta menumbuhkan kesadaran nasional terhadap pentingnya kemerdekaan dari penjajahan. (Koswara, n.d.).

Dalam perkembangannya, Sarekat Islam menjadi organisasi massa terbesar di Hindia Belanda dan memainkan peran penting dalam kebangkitan nasional. Namun, di dalam tubuh SI muncul perbedaan ideologi antara kelompok moderat yang berhaluan nasionalis-religius dan kelompok radikal yang terpengaruh oleh paham sosialisme-komunisme (Kurniawati et al., 2025). Perbedaan ini menimbulkan perpecahan yang cukup tajam di kalangan anggota, hingga akhirnya sebagian kelompok yang berhaluan kiri memisahkan diri untuk membentuk organisasi baru.



Dari perpecahan tersebut lahirlah Sarekat Rakyat (SR) pada tahun 1920. Organisasi ini berorientasi pada perjuangan politik dan sosial dengan dasar ideologi kiri, berfokus pada pembelaan terhadap rakyat kecil, seperti buruh dan petani, yang tertindas oleh sistem kolonial. Meskipun usia Sarekat Rakyat tidak panjang dan pergerakannya sering dianggap radikal oleh pemerintah Belanda, keberadaannya menandai semakin meluasnya kesadaran politik di kalangan rakyat Indonesia. Ketiga organisasi tersebut Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, dan Sarekat Rakyat menjadi bagian penting dari sejarah pergerakan nasional Indonesia, yang menandai kebangkitan kesadaran ekonomi, sosial, dan politik menuju kemerdekaan.

## **B. Peran Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam dan Sarekat Rakyat dalam Pergerakan Nasional**

---

Tujuan utama berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Haji Samanhudi tahun 1911 di Surakarta adalah untuk melindungi kepentingan pedagang pribumi, khususnya umat Islam, dari dominasi dan monopoli pedagang Tionghoa yang saat itu sangat kuat. Selain itu, SDI bertujuan untuk memajukan ekonomi rakyat melalui kerja sama antar pedagang Islam serta membangun rasa solidaritas dan kebersamaan di kalangan umat. Dalam praktiknya, SDI berperan penting sebagai wadah perjuangan ekonomi bagi masyarakat pribumi yang selama ini tersisih oleh kebijakan ekonomi kolonial. SDI juga menjadi cikal bakal lahirnya kesadaran kolektif umat Islam untuk bersatu dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi dan sosial mereka.

Seiring dengan semakin luasnya pengaruh dan jumlah anggota, SDI kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912 di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Tujuan Sarekat Islam lebih luas, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperjuangkan keadilan sosial, serta menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia. SI juga berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran politik rakyat terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Melalui ceramah, rapat umum, dan surat kabar, SI menjadi sarana pendidikan politik bagi rakyat Indonesia dan turut menanamkan nilai-nilai perjuangan, kemandirian, serta rasa cinta tanah air.





Gambar 1. Aktivitas anggota Sarekat Islam pada masa awal pergerakan nasional Sumber: CNN Indonesia

Peranan Sarekat Islam dalam sejarah pergerakan nasional sangat besar. Organisasi ini menjadi pelopor munculnya gerakan nasional berbasis massa yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, baik pedagang, petani, ulama, maupun kaum terpelajar. SI turut berkontribusi dalam memperjuangkan hak rakyat atas pendidikan, ekonomi, dan kebebasan berpendapat. Namun, perpecahan internal antara kelompok moderat dan kelompok radikal di tubuh SI menyebabkan melemahnya organisasi ini. Meskipun demikian, Sarekat Islam tetap meninggalkan warisan penting berupa semangat kebangsaan, kesadaran politik, dan perjuangan sosial yang menginspirasi organisasi-organisasi berikutnya di Indonesia (Bahri, 2022).

Dari perpecahan dalam Sarekat Islam inilah muncul Sarekat Rakyat (SR) sekitar tahun 1920, yang dipengaruhi oleh paham sosialisme dan komunisme. Tujuan Sarekat Rakyat adalah memperjuangkan hak-hak kaum buruh, petani, dan rakyat kecil yang tertindas oleh sistem kolonial dan ketimpangan sosial. Organisasi ini berperan dalam membangkitkan kesadaran politik di kalangan rakyat bawah dan memperjuangkan keadilan sosial dengan cara yang lebih radikal. Meskipun keberadaannya tidak bertahan lama karena dianggap mengancam oleh pemerintah Belanda, Sarekat Rakyat telah memberikan kontribusi besar dalam memperluas basis perjuangan nasional dan menumbuhkan semangat perlawanan terhadap penindasan kolonial di Indonesia (Jayusman & Shavab, 2021).



## C. Pergerakan Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam dan Sarekat Rakyat

Ketiga organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI), Sarekat Islam (SI), dan Sarekat Rakyat (SR) memiliki hubungan historis yang sangat erat dalam perjalanan pergerakan nasional Indonesia. Sarekat Dagang Islam merupakan cikal bakal dari kedua organisasi berikutnya. SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 di Surakarta awalnya berorientasi pada bidang ekonomi dan perdagangan, khususnya untuk melindungi pedagang pribumi dari tekanan pedagang asing dan kebijakan kolonial. Namun, keberhasilan SDI dalam membangkitkan semangat persatuan di kalangan umat Islam membuka jalan bagi gerakan yang lebih luas dan bersifat nasional.

Dari perkembangan tersebut, Sarekat Dagang Islam kemudian berubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912 di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto (Irfan, n.d.). Perubahan nama ini menunjukkan pergeseran orientasi organisasi dari perjuangan ekonomi menuju perjuangan sosial, politik, dan kebangsaan. Dengan cakupan yang lebih luas, Sarekat Islam mampu menarik simpati masyarakat dari berbagai kalangan dan menjadi organisasi massa terbesar pada masa itu. Hubungan SDI dan SI sangat erat, karena SI merupakan kelanjutan langsung dari SDI yang berkembang dari lingkup lokal menuju perjuangan nasional. Nilai-nilai dasar seperti solidaritas, keadilan, dan persaudaraan Islam tetap menjadi landasan dalam perjuangan Sarekat Islam.



Gambar 2. Foto tokoh dan anggota Sarekat Dagang Islam / Sarekat Islam masa awal  
Sumber: riau1.com

Namun, perjalanan Sarekat Islam tidak lepas dari dinamika internal yang kompleks. Dalam tubuh organisasi muncul perbedaan ideologi antara kelompok moderat yang berhaluan nasionalis-religius dan kelompok radikal yang mulai terpengaruh oleh paham sosialisme dan komunisme. Ketegangan ini berujung pada perpecahan, di



mana kelompok yang berhaluan kiri kemudian memisahkan diri dan mendirikan Sarekat Rakyat (SR) sekitar tahun 1920. Dengan demikian, Sarekat Rakyat memiliki hubungan genealogis langsung dengan Sarekat Islam, karena lahir dari ketidakselarasan pandangan di tubuh SI mengenai arah perjuangan politik dan sosial bangsa.

Secara keseluruhan, hubungan antara SDI, SI, dan SR dapat dipandang sebagai rantai perkembangan organisasi pergerakan nasional di Indonesia. SDI menjadi tonggak awal kebangkitan ekonomi umat Islam, SI memperluas perjuangan ke bidang politik dan nasionalisme, sementara SR melanjutkan semangat perlawanan dengan pendekatan yang lebih radikal terhadap penindasan kolonial. Meskipun ketiganya memiliki perbedaan tujuan dan ideologi, ketiganya memiliki kesamaan dalam semangat membela.

kepentingan rakyat Indonesia serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kemerdekaan. Dengan demikian, SDI, SI, dan SR saling berhubungan secara historis dan ideologis sebagai bagian dari proses panjang menuju terbentuknya gerakan nasional Indonesia.

#### **D. Pengaruh Organisasi Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam, Sarekat Rakyat Terhadap Kebangkitan Nasional dan Kemerdekaan Indonesia**

---

Kebangkitan nasional Indonesia tidak lepas dari munculnya berbagai organisasi yang menjadi wadah perjuangan rakyat dalam melawan penindasan kolonial. Salah satu yang memelopori kebangkitan tersebut adalah Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 di Surakarta. SDI berperan besar dalam menumbuhkan kesadaran kolektif umat Islam dan kaum pribumi untuk bersatu memperjuangkan kepentingan ekonomi mereka. Meskipun awalnya hanya bergerak dalam bidang perdagangan, keberadaan SDI menjadi titik awal munculnya gerakan terorganisir yang memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi terhadap ketimpangan ekonomi kolonial. Dari organisasi ini lahir semangat solidaritas, kerja sama, dan kebersamaan sebagai landasan bagi perjuangan bangsa Indonesia (Aditya, 2011).

Dari perkembangan Sarekat Dagang Islam kemudian lahirlah Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto, Sarekat Islam memperluas perjuangan dari bidang ekonomi ke bidang sosial, politik, dan kebangsaan (Irfan, n.d.). SI berhasil menggerakkan massa rakyat secara luas dan menjadi organisasi politik terbesar pada masa itu. Melalui rapat umum, pendidikan



politik, serta media massa, Sarekat Islam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, persatuan, dan kesadaran akan kemerdekaan. Peran SI tidak hanya membangkitkan kesadaran rakyat terhadap ketidakadilan kolonial, tetapi juga memperkenalkan konsep perjuangan kolektif untuk mencapai kebebasan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Dalam perjalanan sejarahnya, Sarekat Islam mengalami dinamika internal yang menimbulkan perpecahan dan melahirkan organisasi baru bernama Sarekat Rakyat (SR) sekitar tahun 1920 (Bahrudin, 2024). Sarekat Rakyat yang dipengaruhi oleh ideologi kiri dan sosialisme menitikberatkan perjuangan pada pembelaan terhadap kaum buruh dan petani sebagai lapisan masyarakat yang paling tertindas. Meskipun metode perjuangannya cenderung radikal, SR turut berperan dalam meningkatkan kesadaran politik rakyat kecil dan memperluas basis gerakan perlawanan terhadap kolonialisme. Keberanian Sarekat Rakyat dalam menentang sistem kolonial menunjukkan bahwa semangat kebangkitan nasional telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tidak hanya kalangan elite atau terpelajar.

Ketiga organisasi tersebut, yaitu Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, dan Sarekat Rakyat, menjadi bagian penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Keberadaannya menandai kebangkitan kesadaran ekonomi, sosial, dan politik menuju kemerdekaan Indonesia. SDI menanamkan dasar kemandirian ekonomi dan solidaritas sosial, SI memperluas perjuangan ke bidang politik dan nasionalisme, sementara SR menggerakkan rakyat kecil dalam perlawanan sosial dan politik. Meskipun memiliki perbedaan ideologi dan pendekatan, ketiganya sama-sama mendorong tumbuhnya kesadaran nasional dan semangat untuk lepas dari belenggu penjajahan. Dari perjuangan organisasi-organisasi inilah lahir generasi pejuang dan pemimpin bangsa yang kelak melanjutkan perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 (Rizqi Apriliyanti, 2019). Semangat kebangkitan nasional telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tidak hanya kalangan elite atau terpelajar.



## **E. Tokoh-Tokoh Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam, dan Sarekat Rakyat**

---

### **1. H. Samanhudi**

Samanhudi lahir di Solo, orang tuanya adalah pedagang batik. Ia adalah pendiri Sarekat Dagang Islam atau SDI yang merupakan awal mula berdirinya Sarekat Islam. Sejak lama, Samanhudi memiliki minat untuk mendirikan organisasi yang bersifat sosial. Tujuannya untuk memberi bantuan dan menjalin persatuan.



Gambar 3. H. Samanhudi, pendiri Sarekat Dagang Islam (SDI).  
Sumber : DetikEdu

### **2. HOS Tjokroaminoto**

Tjokroaminoto adalah sosok yang mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam dan memegang jabatan ketua menggantikan Samanhudi. Tjokroaminoto bergabung dan melakukan pembaharuan dengan menyusun anggaran dasar baru bagi SI. Kemudian ia mengembangkan SI menjadi pergerakan massa yang paling menonjol dan berpengaruh.

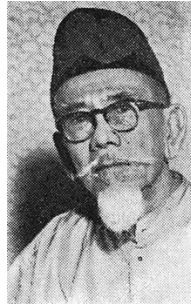


Gambar 4. H.O.S. Tjokroaminoto, tokoh utama Sarekat Islam.  
Sumber: CNN Indonesia.



### 3. **K.H Agus Salim**

Agus Salim bergabung di SI sekitar tahun 1915 sebagai anggota bidang politik. Kecerdasannya dalam ilmu keislaman membuatnya menjadi salah satu tokoh yang memiliki kedudukan penting di SI. Ia menentang kolonial dengan pikiran kritisnya yang tajam tapi disampaikan dengan halus.



Gambar 5. K.H. Agus Salim, tokoh Sarekat Islam dan pemimpin pergerakan nasional.  
Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia.

### 4. **Abdul Muis**

Abdul Muis adalah salah satu anggota Pengurus Besar karena semangat juang dan kecerdasannya. Ia juga kerap menanamkan rasa semangat berjuang untuk melawan kolonial Belanda. Tak hanya itu, Abdul Muis juga memberikan ide untuk mengadakan disiplin organisasi dengan tujuan mengeluarkan anggota SI yang telah terpengaruh paham komunis.



Gambar 6. Abdul Muis, tokoh Sarekat Islam dan pejuang pergerakan nasional.  
Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia.



## 5. Semaoen

Semaoen merupakan tokoh Sarekat Islam Merah yang berhaluan kiri dan memiliki peran penting dalam proses radikalisasi Sarekat Islam. Perbedaan pandangan ideologis antara SI Merah dan SI Putih mendorong lahirnya Sarekat Rakyat pada tahun 1920, yang banyak diisi oleh kader-kader SI Merah, termasuk Semaoen.



Gambar 7. Semaoen, tokoh Sarekat Islam Merah yang berhaluan kiri dan berperan dalam dinamika internal Sarekat Islam.

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia.

## 6. Alimin

Alimin adalah salah satu tokoh yang cukup berpengaruh dalam SI. Ia bergabung bersama SI Merah dengan asas sosialis komunis saat SI pecah menjadi dua. Alimin merupakan anggota Dewan Konstituante yang bertugas, salah satunya menetapkan UUD bagi NKRI.



Gambar 8. Alimin, tokoh pergerakan kiri pasca-perpecahan Sarekat Islam dan aktivis gerakan rakyat.

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia.



## 7. Suryopranoto

Suryopranoto adalah tokoh Sarekat Islam yang dikenal aktif. Ia mendirikan kelas untuk memahami dasar Islam, bukan paham komunis. Akan tetapi ia pernah dipenjara selama tiga bulan sebab tulisannya dalam surat kabar SI.



Gambar 9. Suryopranoto, tokoh Sarekat Islam yang aktif dalam pendidikan dan pergerakan buruh.  
Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia

## F. Rangkuman

---

Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, dan Sarekat Rakyat merupakan tiga organisasi penting yang memiliki peranan besar dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Ketiganya menjadi bukti nyata tumbuhnya kesadaran rakyat Indonesia terhadap pentingnya persatuan, kemandirian, dan perjuangan melawan penindasan kolonial. Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 di Surakarta menjadi pelopor organisasi ekonomi pribumi yang memperjuangkan kepentingan pedagang Islam dari ketimpangan sistem kolonial. Dari organisasi ini lahir semangat kebersamaan dan kekuatan sosial umat Islam.

Perkembangan SDI kemudian melahirkan Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912 di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto, yang memperluas perjuangan dari bidang ekonomi ke arah politik dan sosial. Sarekat Islam berhasil menanamkan nilai-nilai nasionalisme, persatuan, dan kesadaran kebangsaan di kalangan rakyat Indonesia. Namun, perbedaan pandangan di dalam tubuh organisasi ini menimbulkan perpecahan dan melahirkan Sarekat Rakyat (SR) pada tahun 1920. SR membawa semangat perjuangan baru yang berorientasi pada pembelaan terhadap rakyat kecil, terutama buruh dan petani, dengan pengaruh ideologi kiri yang kuat (Dalimunthe et al., 2025).



Meskipun memiliki arah perjuangan dan ideologi yang berbeda, ketiga organisasi tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan keadilan, kemerdekaan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Peran mereka dalam membangkitkan kesadaran nasional menjadi pondasi bagi munculnya organisasi-organisasi lain yang melanjutkan perjuangan menuju kemerdekaan. Melalui perjuangan mereka, bangsa Indonesia mulai menyadari pentingnya persatuan dan semangat kebangsaan untuk melepaskan diri dari penjajahan.



# BAB 2

## **BUDI UTOMO DAN AWAL KEBANGKITAN NASIONAL (1908)**

---

*Irvan Badruljaman, Resma Alfiani Azzahra, Isti Mudrikatun Azzahra*

Pergerakan Nasional lahir dari penderitaan rakyat Indonesia. Penjajahan membuat bangsa Indonesia menjadi terbelakang baik bidang ekonomi, sosial, pendidikan. Pada bidang pendidikan, masyarakat Indonesia sangatlah tertinggal sebagian besar rakyat masih buta huruf. Jumlah sekolah lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang relatif banyak, selain itu tidak semua masyarakat dengan bebas memperoleh pendidikan. Rakyat biasa hanya bisa memasuki sekolah rendah pribumi bahkan beberapa ada yang tidak bisa sekolah. Murid-murid yang bersekolah di sekolah rendah pribumi hanya diajarkan sekedar membaca, menulis dan berhitung. Setelah tamat, mereka hanya diangkat sebagai pegawai rendah dengan gaji yang kecil atau sedikit Pendidikan yang memakai sistem barat hanya boleh diikuti oleh anak pegawai yang bergaji besar atau banyak, anak bangsawan atau anak orang kaya. Rakyat tidak mempunyai tempat untuk mengadu nasib. Penguasa-penguasa pribumi tidak berkuasa lagi.

Kebangkitan Nasional Indonesia menandai salah satu babak terpenting dalam sejarah perjuangan bangsa, yaitu masa di mana kesadaran kolektif untuk membentuk identitas politik yang satu, yakni Indonesia, mulai tumbuh dan terorganisir. Periode ini, yang secara simbolis dibuka dengan kelahiran Budi Utomo (BU) pada 20 Mei 1908, adalah hasil dari akumulasi penderitaan yang panjang di bawah kolonialisme serta respons yang tercerahkan oleh ideologi modern yang baru merasuki Nusantara. Pemicu utama dari dalam negeri adalah penderitaan struktural yang dialami oleh rakyat pribumi akibat eksploitasi yang brutal dan berkepanjangan oleh pemerintah Hindia Belanda. (Haris & Sari, 2018).

Titik balik krusial dalam pertumbuhan kesadaran ini muncul melalui kebijakan Politik Etis (1901) Belanda, khususnya program Edukasi. Meskipun bertujuan terbatas, program ini secara tidak terduga melahirkan golongan intelektual pribumi. Mereka yang mengenyam pendidikan formal ala Barat, terutama di sekolah kedokteran seperti STOVIA, mulai terpapar pada konsep-konsep universal seperti nasionalisme, liberalisme, dan hak asasi manusia. Golongan terpelajar ini menyadari adanya diskriminasi rasial yang dilembagakan oleh penjajah, serta memahami bahwa kemerdekaan hanya bisa dicapai melalui persatuan yang melampaui batas-batas suku. Kesadaran ini menciptakan kelompok pemimpin baru yang mampu merumuskan perjuangan dalam kerangka berpikir modern dan organisasi struktural (Mustafa & Setia, 2021).

## A. Boedi Oetomo

---

Budi Utomo adalah suatu organisasi Pergerakan pertama Di Indonesia Dimana organisasi tersebut didirikan pada tahun 1908, para pendiri organisasi Budi Utomo berasal dari mahasiswa STOVIA pada zaman Belanda. Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji yang dibawah pimpinan R. Soetomo. Pada masa itu. Pada masa itu semangat para pemuda sangatlah menggebu-gebu khususnya orang-orang yang berpendidikan memiliki gaya dan kemampuan untuk bercita--cita suatu saat negeri tercinta dapat merasakan kemerdekaan dan terbebas dari penjajahan asing. Perlu di Pahami juga saat ini penjajahan asing telah merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Penjajahan asing juga Telah menguras kekayaan yang ada di Indonesia. (Khairiyah, 2025)

Latar belakang berdirinya Budi Utomo erat kaitannya dengan kondisi sosial dan politik masyarakat Indonesia pada awal abad ke-20 yang berada di bawah sistem kolonial Hindia Belanda. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang menindas, seperti sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) dan ekonomi liberal, yang menyebabkan kesengsaraan rakyat dan ketimpangan sosial yang tajam. Dalam situasi tersebut, muncul kesadaran baru di kalangan kaum terpelajar untuk berjuang melalui cara yang lebih strategis, yakni melalui organisasi dan pendidikan.



Gambar 10. para mahasiswa STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen) pada tahun 1916 di Batavia.

Sumber: <https://cerdika.com/organisasi-budi-utomo/>



## 1. Pengaruh Kebijakan Politik Etis (Etische Politik)

Salah satu faktor paling penting yang melatar belakangi munculnya kesadaran nasional dan berdirinya organisasi pergerakan seperti Budi Utomo adalah diterapkannya Politik Etis oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1901. Politik Etis merupakan kebijakan yang digagas oleh C. Th. van Deventer, seorang tokoh Belanda yang mengkritik keras eksploitasi kolonial dan menyatakan bahwa Belanda memiliki kewajiban moral untuk “membalas budi” kepada rakyat pribumi atas kekayaan yang telah dieksploitasi selama berabad-abad. Konsep “balas budi” tersebut kemudian dirumuskan ke dalam tiga program utama, yaitu edukasi, irigasi, dan emigrasi (Rosmaida Sinaga et al., 2024).

Meskipun pelaksanaannya tidak sepenuhnya sesuai harapan, kebijakan ini membawa dampak besar terhadap kehidupan rakyat pribumi, terutama dalam aspek pendidikan. Program edukasi membuka peluang bagi anak-anak bumiputra untuk memperoleh pendidikan modern melalui pendirian sekolah-sekolah seperti HIS, MULO, dan sekolah kedokteran STOVIA. Kesempatan pendidikan inilah yang kemudian melahirkan kelompok intelektual pribumi yang kritis terhadap ketidakadilan kolonial dan mulai memikirkan masa depan bangsanya. Para pelajar inilah yang nantinya menjadi motor pembentuk organisasi-organisasi pergerakan nasional, termasuk Budi Utomo.

Program irigasi juga turut meningkatkan produksi pertanian di beberapa wilayah, meskipun tetap diarahkan untuk kepentingan ekonomi kolonial. Namun demikian, pembangunan irigasi ini menciptakan perubahan sosial dan memperluas jangkauan interaksi antarwilayah, sehingga secara tidak langsung menumbuhkan pemahaman mengenai kepentingan bersama sebagai sebuah bangsa.

Sementara itu, program emigrasi yang bertujuan memindahkan penduduk Jawa ke daerah luar pulau untuk mengatasi kelebihan populasi, memang tidak berjalan efektif. Namun kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial mulai mengakui adanya persoalan sosial yang serius, sehingga memberi ruang bagi rakyat untuk menyadari kondisi ketidakadilan yang mereka alami.

Dengan demikian, Politik Etis menjadi momentum penting dalam munculnya elite terpelajar pribumi, yaitu kelompok masyarakat yang kemudian menyadari perlunya perubahan sosial, pendidikan bagi bangsa, dan perjuangan nasional. Kelompok terdidik inilah yang melahirkan Budi Utomo pada tahun 1908, sebagai organisasi modern pertama yang secara jelas bergerak untuk meningkatkan martabat dan kemajuan bangsa. Dengan kata lain, Politik Etis tidak hanya menciptakan peluang pendidikan, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya kesadaran nasional yang menjadi fondasi bagi gerakan kemerdekaan Indonesia.



Program edukasi yang diterapkan dalam kerangka Politik Etis menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam lahirnya kesadaran nasional di Indonesia. Walaupun pemerintah kolonial Hindia Belanda pada awalnya memiliki tujuan pragmatis—yaitu menyediakan tenaga kerja administrasi murah untuk mendukung sistem kolonial—program ini justru menghasilkan dampak yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Seperti dijelaskan Antonius Purwanto (Kompaspedia, 2021), pendidikan kolonial telah melahirkan kaum terpelajar pribumi, sebuah kelompok sosial baru yang nantinya menjadi penggerak utama dalam berbagai organisasi pergerakan nasional, termasuk Budi Utomo.

Melalui akses pendidikan modern, terutama di sekolah-sekolah seperti HIS, MULO, HBS, dan STOVIA, generasi muda pribumi memperoleh pengetahuan ilmiah, kemampuan berpikir kritis, serta wawasan mengenai gagasan-gagasan baru seperti nasionalisme, modernitas, dan kesadaran identitas kolektif. Selain itu, proses pendidikan modern juga mempertemukan pelajar dari berbagai daerah, sehingga mereka mulai menyadari bahwa persoalan sosial dan ketidakadilan kolonial bukan hanya dialami secara lokal, melainkan merupakan masalah bersama seluruh masyarakat Nusantara.



Gambar 11. Pendidikan Kolonial pada masa Politik Etis yang melahirkan kaum terpelajar pribumi sebagai Pelopor Pergerakan Nasional.

Sumber: <https://www.pelajaran.co.id/politik-etis/>

## 2. Munculnya Golongan Priyayi Profesional dan Intelektual

Sistem pendidikan yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 memberikan dampak besar terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia. Sekolah-sekolah modern seperti STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen) membuka kesempatan bagi anak-anak pribumi, baik dari



kalangan priyayi maupun rakyat biasa, untuk memperoleh pendidikan yang sebelumnya tertutup bagi mereka. Menurut Rosmaida Sinaga et al. (2024), akses pendidikan inilah yang kemudian melahirkan generasi baru dengan pola pikir lebih terbuka, rasional, dan kritis terhadap kondisi bangsa. Melalui pendidikan formal, para pelajar pribumi mulai mengenal ilmu pengetahuan modern, sistem administrasi pemerintahan, serta gagasan-gagasan baru tentang kemajuan, kesetaraan, dan nasionalisme. Mereka belajar melihat realitas sosial secara objektif dan mulai menyadari ketidakadilan yang terjadi dalam struktur kolonial. Pendidikan juga mempertemukan pelajar dari berbagai daerah, sehingga mereka memahami bahwa penderitaan akibat penjajahan bukan hanya persoalan lokal, tetapi masalah kolektif yang dialami seluruh rakyat Indonesia.

Kelompok terpelajar ini kemudian dikenal sebagai priyayi profesional dan intelektual, yaitu golongan baru dalam masyarakat yang memiliki kedudukan berdasarkan kemampuan dan pendidikan, bukan semata-mata garis keturunan. Sebagaimana dijelaskan dalam Repository UNJ (2025), priyayi profesional ini memiliki kompetensi, kecakapan administrasi, dan kesadaran nasional yang lebih tinggi dibandingkan priyayi tradisional. Mereka menjadi jembatan antara rakyat biasa dan struktur kolonial, sekaligus menjadi penggerak utama dalam pergerakan kebangsaan.

Para intelektual inilah yang menjadi fondasi lahirnya organisasi seperti Budi Utomo. Mereka bukan hanya memiliki kemampuan membaca situasi politik kolonial dengan lebih tajam, tetapi juga memiliki kepedulian untuk memperjuangkan harkat dan martabat bangsa. Dengan demikian, sistem pendidikan kolonial secara tidak langsung telah menumbuhkan kelompok sosial baru yang kelak memimpin gerakan nasional menuju kebangkitan bangsa. Golongan terpelajar ini mulai merasakan adanya jurang pemisah yang lebar antara kemajuan mereka dengan kondisi keterpurukan mayoritas rakyat pribumi akibat eksploitasi kolonial (Repository UNJ, 2025). Kesadaran inilah yang menumbuhkan keinginan kuat untuk mengangkat derajat dan martabat bangsa melalui jalur pendidikan dan budaya.

### **3. Peran Inspiratif Dr. Wahidin Sudirohusodo**

Gagasan lahirnya organisasi modern seperti Budi Utomo tidak dapat dilepaskan dari peran penting seorang tokoh senior, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sebagai seorang dokter Jawa yang terdidik dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kondisi masyarakat pribumi, Dr. Wahidin menjadi salah satu penggerak awal kesadaran nasional yang berorientasi pada pendidikan dan kemajuan bangsa. Menurut CNN



Indonesia (2021), Dr. Wahidin aktif berkeliling ke berbagai daerah, terutama sekolah-sekolah, untuk menyebarkan ide perlunya pembaruan melalui pendidikan.

Motivasi Dr. Wahidin muncul dari keprihatinannya melihat banyak anak pribumi yang cerdas tetapi tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Dari persoalan ini, ia menggagas pembentukan *Studiefonds* atau Dana Pelajar, sebuah program beasiswa untuk membantu pemuda pribumi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Baginya, pendidikan adalah syarat utama bagi kemajuan bangsa dan menjadi jalan paling efektif untuk melawan ketertinggalan akibat sistem kolonial. Selama perjalanannya, Dr. Wahidin melakukan pendekatan khusus kepada para pelajar dan generasi muda, termasuk mahasiswa STOVIA. Ia menyampaikan gagasannya melalui diskusi, ceramah, dan pertemuan informal yang bertujuan membangkitkan kesadaran bahwa kemajuan bangsa hanya mungkin dicapai dengan peningkatan kualitas pendidikan, moral, dan pemikiran. Upaya ini disambut baik oleh para pelajar STOVIA, yang kemudian menjadikan ide-ide Dr. Wahidin sebagai inspirasi untuk mendirikan organisasi yang terstruktur. Ide-idenya menjadi fondasi intelektual bagi pembentukan organisasi modern pertama di Indonesia. Ia juga memberi keyakinan bahwa perjuangan harus diarahkan melalui pendidikan, bukan semata-mata perlawanan fisik seperti pada abad sebelumnya. Dengan cara ini, Dr. Wahidin meletakkan dasar pemikiran tentang pentingnya pergerakan nasional berbasis intelektual yang kemudian diwujudkan oleh generasi muda STOVIA dalam organisasi Budi Utomo.

Dengan demikian, peran Dr. Wahidin Sudirohusodo dapat dipahami sebagai katalis kebangkitan nasional: ia menghubungkan pengalaman kolonial dengan kebutuhan perubahan, membangkitkan semangat pelajar, dan menanamkan gagasan bahwa kebangkitan bangsa dimulai dari pendidikan dan kesadaran kolektif. Dr. Wahidin secara khusus mengemukakan ide mengenai dana bantuan pelajar (*studiefonds*) untuk membantu siswa-siswa pribumi yang cerdas namun kekurangan biaya (Gamedia Literasi, 2025). Kunjungannya ke STOVIA pada akhir 1907 disambut baik oleh para mahasiswa, khususnya Soetomo, yang kemudian mengambil langkah nyata untuk mewujudkan ide tersebut dalam bentuk organisasi.





Gambar 12. Dr. Wahidin Sudirohusodo, tokoh pelopor kebangkitan nasional yang menggagas Studiefonds dan menekankan pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa Indonesia.  
Sumber: <https://sdn29.bimakota.sch.id/web/detail-berita/137/->

#### **4. Transformasi Perjuangan dari Fisik ke Intelektual**

Sebelum tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah umumnya bersifat lokal dan menggunakan kekuatan fisik (perang), yang pada akhirnya selalu dapat dipadamkan oleh Belanda. Berdirinya Budi Utomo menandai perubahan paradigma perjuangan.

Para pelajar STOVIA memainkan peran penting dalam lahirnya Budi Utomo karena mereka memiliki kesadaran baru mengenai bentuk perjuangan yang harus ditempuh untuk menghadapi dominasi kolonial. Menurut Rosmaida Sinaga et al. (2024), para pelajar tersebut menyadari bahwa kekuatan kolonial Belanda memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik, didukung oleh administrasi modern, birokrasi yang kuat, serta strategi politik yang terstruktur. Oleh sebab itu, perjuangan yang masih bersifat kedaerahan dan tidak terkoordinasi tidak lagi mampu menandingi sistem tersebut. Kesadaran inilah yang mendorong para pelajar untuk membentuk sebuah organisasi modern yang mampu menyatukan pemikiran dan semangat perjuangan. Mereka percaya bahwa perjuangan di masa modern tidak lagi cukup dilakukan dengan kekuatan fisik semata, tetapi harus dilakukan melalui pemikiran yang rasional, pendidikan, dan pembentukan kesadaran kolektif. Dengan pendekatan modern ini, perjuangan tidak hanya menasar penjajah secara langsung, tetapi juga bertujuan mengangkat martabat bangsa melalui kemajuan sosial, budaya, dan intelektual.

Budi Utomo kemudian lahir sebagai perwujudan dari gagasan tersebut: sebuah organisasi terstruktur yang berfokus pada peningkatan pendidikan, penyadaran masyarakat, dan pembinaan generasi muda. Organisasi ini bukan sekadar wadah berkumpul, tetapi simbol perubahan cara pandang perjuangan bangsa. Di dalamnya, para pelajar STOVIA menata visi pergerakan yang lebih sistematis, menghadirkan bentuk organisasi pertama yang berorientasi pada kemajuan



nasional. Pada masa itu, kondisi sosial-politik Indonesia berada dalam penjajahan yang menindas. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang menguras sumber daya alam dan menindas masyarakat pribumi. Akibatnya, rakyat hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan, sedangkan akses terhadap pendidikan dan jabatan pemerintahan hanya diberikan kepada kaum elit tertentu. Dalam situasi seperti inilah muncul kesadaran baru di kalangan pemuda terpelajar, bahwa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan tidak bisa lagi dilakukan secara kedaerahan atau bersifat fisik semata, tetapi harus melalui jalur pendidikan, organisasi, dan kesadaran nasional.

Faktor penting lain yang memicu lahirnya Budi Utomo adalah pelaksanaan Politik Etis (*Ethische Politiek*) pada awal abad ke-20. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi masyarakat pribumi untuk mendapatkan pendidikan modern, meskipun masih terbatas. Dari kebijakan inilah muncul kaum intelektual terdidik, seperti dr. Wahidin Soedirohusodo, yang mulai memikirkan cara untuk memajukan bangsanya melalui ilmu pengetahuan. Wahidin memperkenalkan gagasan *Studiefonds* (Dana Pelajar), yaitu gerakan pengumpulan dana untuk membantu pelajar pribumi agar dapat melanjutkan pendidikan. Gagasan ini kemudian menginspirasi para pelajar STOVIA untuk mendirikan organisasi yang memiliki cita-cita nasional.

Menurut Utami (2020), *“Budi Utomo merupakan bentuk awal kesadaran nasional modern yang memperjuangkan kemajuan bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan.”* Organisasi ini menjadi pelopor dalam memperkenalkan model perjuangan baru yang bersifat intelektual dan terorganisir, menggantikan perjuangan kedaerahan yang selama ini bersifat spontan dan bersenjata. Selain itu, Budi Utomo juga berperan penting dalam membangun solidaritas sosial dan semangat persatuan di antara kaum pribumi. Melalui kongres-kongres yang mereka selenggarakan, seperti Kongres Pertama di Yogyakarta pada tahun 1908, Budi Utomo berhasil menyatukan pandangan para tokoh dari berbagai daerah untuk memperjuangkan kemajuan bangsa secara bersama.

Dengan berdirinya Budi Utomo, arah perjuangan bangsa Indonesia mengalami perubahan besar — dari perlawanan fisik yang bersifat lokal menjadi perjuangan nasional yang terorganisir dan intelektual. Oleh karena itu, Budi Utomo diakui sebagai pelopor Kebangkitan Nasional Indonesia, dan tanggal berdirinya, 20 Mei 1908, kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.



## **B. Strategi Perjuangan Boedi Utomo dalam Membangun Kesadaran Nasional**

---

Selama berabad-abad, bangsa Indonesia hidup di bawah kekuasaan penjajah asing, terutama dari bangsa-bangsa Eropa yang datang dengan motif ekonomi, politik, dan kekuasaan. Kolonialisme dan imperialisme Barat telah meninggalkan penderitaan mendalam bagi rakyat Indonesia. Penjajahan yang berlangsung begitu lama membuat sebagian masyarakat menganggap bahwa bangsa Indonesia tidak melakukan perlawanan dan hanya menerima nasib sebagai bangsa terjajah. Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sejak awal, rakyat di berbagai daerah telah melakukan berbagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan asing yang menindas, meskipun sifatnya masih terpecah dan bersifat lokal (kedaerahan).

Pada masa itu, belum tumbuh kesadaran nasional yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia sebagai satu bangsa yang memiliki identitas, tanah air, dan cita-cita yang sama. Perlawanan masih dilakukan oleh kerajaan-kerajaan atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang merasa kepentingannya terganggu oleh kekuasaan penjajah. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 masih berfokus pada kepentingan daerah masing-masing, belum berdasarkan kesadaran kebangsaan yang luas.

Salah satu contoh awal dari perjuangan kedaerahan tersebut terjadi di wilayah Maluku Utara (Ternate dan Tidore) pada abad ke-16. Kedua kerajaan ini menolak keras dominasi bangsa Portugis yang pada saat itu berusaha menguasai jalur perdagangan rempah-rempah, yang merupakan sumber utama kehidupan masyarakat setempat. Perlawanan rakyat Maluku Utara melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari rakyat biasa hingga para pemimpin kerajaan. Menurut catatan sejarah, pada masa pemerintahan Sultan Said Barakat Syah (1583–1606 M), kekuatan Portugis berhasil diusir dari wilayah tersebut dan terpaksa pindah ke Maluku Selatan. Namun, di wilayah baru itu, mereka justru berhadapan dengan bangsa Belanda yang datang dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan memperluas kekuasaan kolonialnya (Sudiyo, 1997; Melisa et al., 2023).

Peristiwa-peristiwa semacam ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk melawan penjajahan sebenarnya telah ada sejak lama, tetapi belum diiringi dengan semangat nasionalisme yang menyeluruh. Kesadaran sebagai satu bangsa yang terikat oleh nasib dan cita-cita bersama baru tumbuh pada awal abad ke-20, seiring munculnya kaum terpelajar dan lahirnya organisasi-organisasi modern seperti Budi Utomo. Organisasi inilah yang kemudian mengubah arah perjuangan dari perlawanan



bersifat lokal menuju gerakan nasional yang terorganisir dan berbasis pendidikan serta persatuan.



Gambar 13. Suasana Pendidikan Kolonial bagi pribumi yang menjadi sarana lahirnya kaum terpelajar dan tumbuhnya kesadaran nasional pada awal abad ke-20.

Sumber: Arsip kolonial Hindia Belanda (KITLV Leiden)

## 5. Strategi Pendidikan Sebagai Dasar Perjuangan

Pendidikan menempati posisi yang sangat sentral dalam strategi perjuangan Budi Utomo. Para perintis organisasi ini memiliki keyakinan kuat bahwa peningkatan taraf intelektual masyarakat pribumi merupakan prasyarat utama bagi kemajuan bangsa. Pada masa kolonial, pemerintah Belanda membatasi akses pendidikan bagi kaum pribumi sehingga hanya kelompok tertentu yang dapat mengenyam pendidikan modern. Kondisi ini mendorong Budi Utomo untuk menjadikan pendidikan sebagai salah satu fokus utama perjuangan mereka.

Upaya yang dilakukan mencakup penyediaan bantuan pendidikan melalui *Studiefonds*, mendorong perluasan kesempatan belajar bagi kaum pribumi, serta menjadikan institusi pendidikan sebagai basis penyebaran gagasan pembaruan dan kebangsaan. Sekolah-sekolah, terutama STOVIA, berperan sebagai pusat pembentukan intelektual muda yang memiliki kesadaran kritis terhadap ketidakadilan kolonial. Melalui pendidikan, para pemuda ini tidak hanya memperoleh kemampuan akademik, tetapi juga wawasan mengenai nilai-nilai modernitas, kemajuan, dan persamaan hak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lubis et al. (2022) yang menyatakan bahwa *“Budi Utomo melihat pendidikan sebagai alat pembebasan bangsa yang dapat menumbuhkan kesadaran kritis terhadap kolonialisme dan menyiapkan generasi terpelajar untuk memimpin masyarakat.”* Dengan kata lain, pendidikan dipahami sebagai instrumen strategis yang tidak hanya bersifat intelektual, tetapi juga politis dan sosial. Pendidikan modern di STOVIA juga memberikan ruang bagi pertemuan pelajar dari berbagai etnis dan



daerah di Nusantara. Proses pergaulan ini memperluas wawasan geografis dan kultural para pelajar, yang pada gilirannya menumbuhkan kesadaran bahwa mereka berasal dari satu masyarakat besar dengan pengalaman penindasan yang sama. Kesadaran kolektif inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi lahirnya identitas nasional dan berkembangnya semangat kebangsaan di lingkungan pelajar.

## **6. Strategi Kebudayaan dan Penguatan Identitas Nasional**

Selain pendidikan, Budi Utomo menerapkan strategi kebudayaan sebagai upaya membangkitkan rasa percaya diri dan kebanggaan sebagai bangsa. Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda kerap merendahkan budaya dan tradisi pribumi, sehingga menyebabkan hilangnya kebanggaan masyarakat terhadap jati diri mereka sendiri. Budi Utomo berusaha mengembalikan martabat tersebut dengan mengangkat kembali nilai-nilai budaya Jawa dan Nusantara sebagai sumber kekuatan moral bangsa.

Upaya ini dilakukan melalui kegiatan diskusi budaya, pembinaan seni, pelestarian bahasa dan tradisi, serta penyebaran gagasan modern yang dikombinasikan dengan nilai-nilai lokal. Organisasi ini menempatkan kebudayaan sebagai bagian penting dari pembentukan kesadaran nasional, sebab bangsa yang tidak mengenal budayanya sendiri akan sulit membangun semangat persatuan.

Menurut Melisa et al. (2023), *“gerakan kebudayaan pada masa awal kebangkitan nasional menjadi sarana penting bagi pembentukan identitas kolektif yang melampaui batas-batas kedaerahan.”* Dengan demikian, strategi kebudayaan Budi Utomo tidak hanya bersifat pelestarian, tetapi juga berfungsi sebagai medium integrasi sosial yang memperluas pandangan masyarakat mengenai persatuan bangsa.

## **7. Strategi Perorganisasian dan Modernisasi Gerakan**

Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang memperkenalkan sistem keanggotaan, kepengurusan, rapat-rapat resmi, serta struktur organisasi yang teratur. Modernisasi dalam pengorganisasian ini menjadi langkah strategis untuk memobilisasi masyarakat pribumi secara lebih efektif.

Para pelajar STOVIA menyadari bahwa perjuangan kedaerahan tidak lagi relevan dalam menghadapi kekuatan kolonial yang terorganisir. Karena itu, mereka membangun sebuah wadah perjuangan modern yang memadukan rasionalitas, manajemen, dan kepemimpinan intelektual (Rosmaida Sinaga et al., 2024).



Organisasi ini menjadi contoh pertama bagi berdirinya organisasi nasional lainnya seperti Sarekat Islam dan Indische Partij. Sistem organisasi Budi Utomo yang rapi menciptakan pola baru dalam perjuangan politik bangsa Indonesia, yaitu perjuangan yang terencana, terstruktur, dan berbasis argumentasi.

## **8. Strategi Advokasi Sosial dan Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat**

Strategi lain yang penting adalah upaya memperjuangkan perbaikan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan kehidupan sosial. Budi Utomo memandang bahwa kebangkitan bangsa tidak akan terwujud tanpa meningkatnya kondisi hidup rakyat.

Program-program yang dijalankan mencakup penyuluhan kesehatan, bantuan sosial, pengembangan ekonomi kerakyatan, serta penyaluran beasiswa bagi kalangan tidak mampu. Strategi ini membuktikan bahwa Budi Utomo tidak hanya bergerak dalam ranah pendidikan dan budaya, tetapi juga berupaya menghadirkan perubahan langsung dalam kehidupan masyarakat. Menurut Haris & Sari (2018), *“perubahan sosial hanya dapat dicapai apabila organisasi mampu menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat.”* Hal ini sejalan dengan misi Budi Utomo untuk memperbaiki nasib bangsa melalui pendekatan yang damai, rasional, dan konstruktif.

## **9. Strategi Politik Lunak melalui Kolaborasi dan Diplomasi**

Berbeda dari organisasi pada periode berikutnya, Budi Utomo menerapkan strategi *politik etis* atau *soft politics*. Mereka lebih memilih pendekatan diplomasi, diskusi, dan kerja sama dengan pemerintah kolonial daripada konfrontasi langsung. Hal ini sesuai dengan konteks sosial saat itu, ketika gerakan politik radikal belum muncul secara kuat. Melalui pendekatan ini, Budi Utomo berusaha memperjuangkan peningkatan anggaran pendidikan, pembukaan sekolah-sekolah baru, serta pelibatan pribumi dalam jabatan pemerintahan. Pendekatan ini menjadi dasar penting bagi tumbuhnya elite birokrat dan intelektual yang berpengaruh pada fase berikutnya dari gerakan nasional.

Menurut Lubis et al. (2022), *“strategi politik moderat Budi Utomo menjadi jembatan antara kepentingan rakyat pribumi dan kebijakan pemerintah kolonial.”* Meski terbatas, strategi ini menghasilkan dampak jangka panjang bagi perkembangan nasionalisme Indonesia.



## **C. Peran Boedi Utomo dalam Proses Kebangkitan Nasional dan Pembentukan Identitas Kebangsaan Indonesia**

---

Kebangkitan Nasional Indonesia yang ditandai dengan berdirinya Boedi Utomo pada 20 Mei 1908 merupakan tonggak awal berkembangnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Organisasi ini lahir dari gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan sejumlah mahasiswa School Tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) di Jakarta, yang pada masa itu menjadi pusat pendidikan bagi calon-calon dokter pribumi. Boedi Utomo tidak sekadar organisasi sosial biasa, tetapi menjadi simbol bangkitnya semangat baru di kalangan rakyat pribumi untuk memperjuangkan kemajuan, persatuan, dan martabat bangsa.

Dr. Wahidin Sudirohusodo, sebagai tokoh yang memiliki visi jauh ke depan, meyakini bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Menurutnya, perjuangan fisik semata tidak lagi memadai karena bangsa Indonesia memerlukan kecerdasan, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran kolektif untuk menghadapi kekuatan kolonial yang modern dan terorganisir. Gagasan inilah yang mendorong Dr. Wahidin melakukan perjalanan keliling Pulau Jawa untuk menggalang dana, terutama guna membantu para pelajar pribumi yang memiliki potensi akademis tetapi terkendala kondisi ekonomi. Upayanya mendapat sambutan luas di kalangan mahasiswa STOVIA, yang kemudian menjadi motor utama berdirinya Boedi Utomo sebagai organisasi modern pertama di Indonesia.

Peran Budi Utomo semakin terlihat ketika organisasi ini melakukan berbagai upaya untuk memperluas jangkauan dan anggotanya. Dengan bergabungnya lebih banyak orang dari berbagai daerah, semangat nasionalisme semakin meluas dan tumbuh secara lebih merata. Menurut Wahidah et al. (2025), proses perluasan jaringan dan keanggotaan ini menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kesadaran kebangsaan, karena mempertemukan pemuda dengan latar belakang sosial budaya yang beragam dalam tujuan perjuangan yang sama. Selain itu, Budi Utomo juga berkontribusi dalam menggeser pola perjuangan dari perlawanan fisik kedaerahan menuju gerakan modern yang lebih intelektual dan terstruktur. Organisasi ini mencontohkan model perjuangan baru yang tidak hanya menekankan perlawanan, tetapi juga pembangunan kualitas manusia sebagai modal untuk mencapai kemerdekaan di masa depan. Melalui pendekatan yang lebih sistematis, terdidik, dan terorganisir, Budi Utomo membuka jalan bagi munculnya organisasi-organisasi nasional lainnya, seperti Sarekat Islam, Indische Partij, hingga organisasi pemuda pada era 1920-an.



Gambar 14. Anggota Budi Utomo  
Sumber: (Dok Indonesia.go.id/Istimewa)

Budi Utomo merupakan organisasi yang sejak awal berdirinya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi. Arah perjuangannya tidak langsung bersifat politis karena kondisi sosial dan politik pada masa itu belum memungkinkan adanya gerakan yang terang-terangan menentang pemerintah kolonial. Oleh sebab itu, program-program Budi Utomo lebih banyak diarahkan pada bidang sosial dan budaya, seperti pengembangan pendidikan, penyuluhan, serta kegiatan yang bertujuan memajukan pemikiran dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai organisasi yang lahir dari lingkungan pelajar STOVIA, Budi Utomo pada masa awal perkembangannya memiliki jangkauan yang masih terbatas. Keanggotaannya didominasi oleh pemuda-pemuda terpelajar dari wilayah Jawa dan Madura. Hal ini bukan hanya karena faktor geografis, tetapi juga karena pendidikan modern yang menjadi basis organisasi ini pada masa itu lebih banyak tersedia di kedua wilayah tersebut. Meski demikian, seiring berkembangnya kesadaran dan minat terhadap organisasi ini, jangkauan keanggotaannya perlahan meluas hingga mencakup wilayah lain seperti Bali. Perluasan ini menunjukkan bahwa gagasan yang dibawa Budi Utomo mengenai pentingnya pendidikan, kemajuan sosial, dan persatuan bangsa mendapat sambutan positif di berbagai daerah (Wahidah et al., 2025)

Kebangkitan Nasional tidak hanya menjadi momen historis dalam konteks pendirian organisasi, tetapi juga membawa dampak luas bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam bidang politik, mulai tumbuh kesadaran bahwa kolonialisme harus dilawan melalui strategi yang lebih rasional dan terorganisir. Di bidang sosial, interaksi antarpribumi dari berbagai daerah menyebabkan munculnya rasa persatuan sebagai satu bangsa yang memiliki nasib dan tujuan yang sama. Dari segi budaya, muncul dorongan untuk mengangkat martabat serta



memperkuat jati diri bangsa melalui pengembangan budaya lokal dan semangat keindonesiaan.

Dampak paling besar dari Kebangkitan Nasional terlihat dalam dunia pendidikan. Peristiwa ini melahirkan kesadaran baru bahwa pendidikan bukan sekadar alat mobilitas sosial, tetapi juga sarana untuk membangun nasionalisme, memperkuat identitas bangsa, dan menyiapkan generasi yang mampu memimpin perjuangan menuju kemerdekaan. Kelahiran organisasi-organisasi pergerakan lain setelah Boedi Utomo, seperti Sarekat Islam, Indische Partij, serta berbagai kelompok pemuda pada dekade berikutnya, menunjukkan bahwa pendidikan telah menjadi fondasi bagi gerakan kebangsaan modern di Indonesia.

Dengan demikian, Kebangkitan Nasional 1908 merupakan fase penting yang mengubah arah perjalanan bangsa. Peristiwa ini menjadi awal tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa bangsa Indonesia sejatinya memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, memperjuangkan kemerdekaan, serta membangun peradaban yang maju. Meski terdapat pendapat bahwa benih-benih nasionalisme telah muncul sebelumnya melalui perlawanan daerah atau pengaruh global, Kebangkitan Nasional tetap dianggap sebagai momen yang menyatukan dan menggerakkan rakyat menuju perjuangan nasional yang lebih terorganisir dan visioner. (Ismail Triyanto & Sukari, 2024).

## **D. Rangkuman**

---

Berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 merupakan tonggak awal Kebangkitan Nasional yang menandai perubahan mendasar dalam pola perjuangan bangsa Indonesia. Latar belakang kemunculannya tidak terlepas dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada masa kolonial Belanda yang menempatkan rakyat pribumi dalam kondisi tertindas dan terbelakang. Melalui penerapan Politik Etis khususnya program edukasi—muncul kelompok terpelajar pribumi yang semakin sadar akan ketidakadilan kolonial dan pentingnya memajukan bangsa melalui pendidikan, organisasi, serta kesadaran intelektual. Para pelajar STOVIA menjadi tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga pemahaman mengenai modernitas, kesetaraan, dan nasionalisme yang kemudian mendorong tumbuhnya identitas kebangsaan.

Budi Utomo hadir sebagai organisasi modern pertama yang mengubah bentuk perjuangan dari yang sebelumnya bersifat kedaerahan dan mengandalkan kekuatan fisik menjadi perjuangan yang lebih terstruktur, rasional, dan berbasis intelektual. Organisasi ini memfokuskan kegiatannya pada bidang pendidikan,



kebudayaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial karena memahami bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui berbagai program seperti perluasan kesempatan belajar, penyuluhan sosial, penguatan nilai budaya, dan pembangunan kesadaran bersama, Budi Utomo tidak hanya membina intelektual muda, tetapi juga menanamkan semangat persatuan yang melampaui batas-batas etnis dan daerah. Strategi perjuangan yang dijalankan mencerminkan pandangan visioner bahwa perubahan sosial harus dibangun melalui pencerahan pemikiran dan penguatan identitas nasional.

Selain itu, kehadiran Budi Utomo membuka jalan bagi tumbuhnya organisasi-organisasi pergerakan selanjutnya, seperti Sarekat Islam, Indische Partij, hingga organisasi pemuda yang memainkan peran besar dalam perkembangan nasionalisme Indonesia. Budi Utomo menjadi inspirasi bahwa perjuangan kolektif dalam wadah organisasi modern adalah kekuatan baru yang mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan.



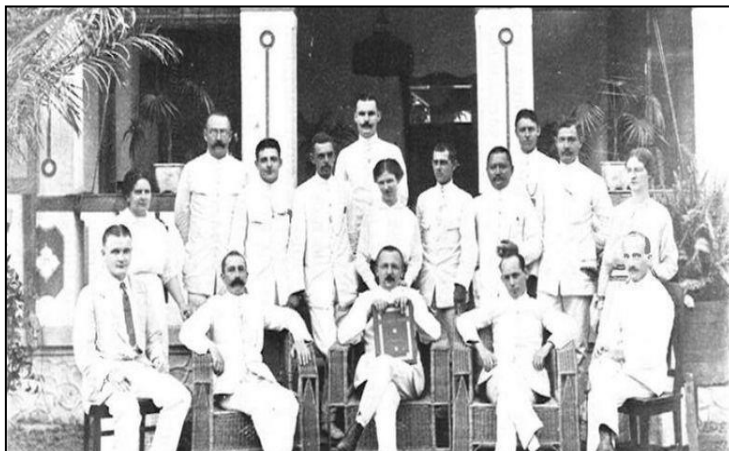
# BAB 3

## PKI DAN PERGOLAKAN PERGERAKAN NASIONAL (1926-1927)

*Hera Febrianti, Dita Amalia, Rizky Firmansyah*

Sejarah politik Indonesia sejak masa kolonial tidak dapat dilepaskan dari perkembangan berbagai ideologi yang memengaruhi dinamika pergerakan bangsa (Crouch, 2007). Salah satu ideologi yang memiliki peran penting sekaligus menimbulkan kontroversi adalah komunisme, yang diwujudkan melalui pembentukan dan perkembangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kehadiran komunisme di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Hindia Belanda yang ditandai oleh ketimpangan sosial, eksploitasi kolonial, serta keterbatasan akses rakyat pribumi terhadap pendidikan dan kesejahteraan. Dalam konteks tersebut, ideologi perjuangan kelas yang ditawarkan komunisme menjadi daya tarik bagi kelompok masyarakat tertindas. Situasi eksploitasi dan ketimpangan pada masa kolonial menciptakan lahan subur bagi bangkitnya gerakan komunis di Indonesia (Batubara, 2022).

Masuknya ide-ide sosialisme dan komunisme ke Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pemikiran Eropa yang dibawa oleh kaum intelektual dan aktivis pergerakan. Ideologi tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan politik yang terorganisasi dan berorientasi pada perlawanan terhadap kolonialisme.



Gambar 15. Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), Cikal Bakal PKI  
Sumber: <https://share.google/VtpyIq0wN3TMrqhoh>

PKI sendiri berawal dari organisasi Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) yang didirikan pada tahun 1914 oleh Henk Sneevliet bersama tokoh-tokoh



sosialis Belanda. Pada tahap awal, ISDV didominasi oleh kaum Eropa, namun dalam perkembangannya mulai melibatkan tokoh-tokoh pribumi seperti Semaun dan Darsono. Proses ini menandai terjadinya indigenisasi gerakan komunis di Indonesia, di mana ajaran perjuangan kelas mulai diadaptasi dengan kondisi sosial dan politik masyarakat kolonial.

Memasuki awal 1920-an, ISDV bertransformasi menjadi Partai Komunis Indonesia dan menjadi salah satu partai politik pertama yang secara terbuka mengusung ideologi komunisme. Perkembangan PKI semakin menguat seiring dengan meningkatnya kesadaran politik rakyat serta meluasnya jaringan organisasi buruh dan tani. Puncak dari fase awal perkembangan tersebut ditandai dengan terjadinya pemberontakan PKI pada tahun 1926-1927. Peristiwa ini menjadi titik awal munculnya kewaspadaan pemerintah kolonial terhadap gerakan komunis di Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa konflik antara kekuasaan negara dan ideologi kiri telah berlangsung jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan (Nami, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kemunculan PKI sebelum kemerdekaan merupakan bagian dari dinamika perlawanan terhadap kolonialisme yang dipengaruhi oleh kondisi struktural masyarakat serta arus ideologi global. Oleh karena itu, kajian mengenai latar belakang berdirinya PKI dan perkembangan awal ideologi komunisme menjadi penting untuk memahami akar sejarah konflik ideologis di Indonesia, sekaligus sebagai pijakan dalam menganalisis perkembangan politik nasional pada masa pergerakan.

## **A. PKI dan perkembangan Ideologi Komunisme di Indonesia**

---

### **1. Latar Belakang Berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI)**

Partai Komunis Indonesia (PKI) lahir dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi pada masa penjajahan Belanda yang sarat dengan ketimpangan sosial serta semangat perlawanan terhadap imperialisme. Akar berdirinya PKI tidak bisa dilepaskan dari organisasi *Indische Sociaal-Democratische Vereeniging* (ISDV), yang didirikan pada tahun 1914 di Semarang oleh tokoh sosialis Belanda bernama Henk Sneevliet bersama sejumlah aktivis buruh dan guru di Hindia Belanda. ISDV sendiri merupakan organisasi yang membawa ide-ide sosialisme dan komunisme dari Eropa ke tanah jajahan. Kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa itu tengah mengalami penderitaan akibat eksploitasi ekonomi kolonial, seperti sistem tanam paksa dan pajak yang memberatkan rakyat. Di sisi lain, muncul kesadaran nasional di kalangan pribumi melalui organisasi seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Islam



(1912), dan Indische Partij (1912), yang menjadi cikal bakal pergerakan politik modern di Indonesia. Namun, ISDV berbeda karena mengusung ideologi perjuangan kelas dan menolak kompromi terhadap sistem kolonial. Pada tahun 1920, ISDV secara resmi berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Perubahan ini menandai pergeseran dari organisasi sosialis kolonial menjadi partai politik pribumi yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan dasar ideologi komunisme. Tokoh-tokoh penting seperti Semaun, Darsono, dan Alimin memainkan peran besar dalam transformasi ini. Mereka membawa gagasan Marx, Engels, dan Lenin tentang perjuangan kelas dan revolusi proletar sebagai sarana untuk membebaskan rakyat dari penindasan penjajahan (Anugrah et al., 2022).



Gambar 16. Henk Sneevliet: Tokoh Komunis Belanda yang Membawa Ideologi Komunisme ke Indonesia

Sumber: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=&title=Special%3AMediaSearch>





Gambar 17. Semaun & Darsono: Tokoh PKI

Sumber: <https://phesolo.wordpress.com/2012/01/18/disiplin-partai-kritik-darsono-dan-perpecahan-sarekat-islam-bagian-1/>

Seiring dengan perkembangannya, PKI berupaya mengorganisasi kaum buruh dan petani sebagai kekuatan utama revolusi. Namun, upaya mereka menghadapi tekanan kuat dari pemerintah kolonial Belanda. Puncaknya terjadi pada pemberontakan PKI di tahun 1926-1927 di Banten dan Sumatera Barat yang berujung pada kegagalan. Akibatnya, ribuan anggota PKI ditangkap, dibuang ke Boven Digoel, dan partai ini dinyatakan terlarang selama masa kolonial.

## 2. Perkembangan Ideologi Komunisme di Indonesia

Kegagalan pemberontakan PKI pada tahun 1926-1927 menjadi titik balik perkembangan komunisme di Indonesia. Pemerintah kolonial merespons dengan penindasan massal, penangkapan ribuan kader, serta pengasingan besar-besaran ke Boven Digoel. Kegagalan pemberontakan tersebut disebabkan lemahnya koordinasi organisasi, minimnya kesiapan massa, dan strategi revolusioner yang terlalu terburu-buru (Listyawan & Khoirulloh, 2024). Peristiwa ini menyebabkan gerakan komunis terpaksa bergerak secara sembunyi-sembunyi dan perlahan kehilangan kekuatan terbukanya pada era kolonial. PKI dilarang setelah pemberontakan 1926-1927, ideologi komunisme tidak hilang dari pergerakan rakyat. Eks-kader PKI masih mempertahankan jaringan bawah tanah yang aktif di



kalangan buruh dan petani (Batubara, 2022). Kesenjangan sosial dan eksploitasi kolonial membuat gagasan perjuangan kelas tetap relevan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Dengan demikian, masa setelah pemberontakan justru menjadi periode konsolidasi ideologi secara tersembunyi, bukan kehancuran total.



Gambar 18. Semaun: Tokoh PKI  
(Sumber: <https://share.google/Bseo4qECCFDsvZ5Lt>)

Setelah kemerdekaan, ruang politik yang lebih terbuka memungkinkan ideologi komunisme muncul kembali. Musso yang kembali dari Soviet pada 1948 membawa gagasan Jalan Baru untuk mengoreksi kekalahan PKI pada pemberontakan 1926-1927. Musso menilai kegagalan PKI masa kolonial terjadi karena kurangnya basis massa dan strategi revolusi yang prematur. Namun, upaya tersebut kembali berakhir tragis setelah meletusnya Peristiwa Madiun 1948 (Afrianto et al., 2024). Pada awal 1950-an, PKI bangkit kembali di bawah D.N. Aidit dengan strategi yang lebih moderat dan legal. PKI menampilkan diri sebagai partai parlementer modern dan memperluas basis massa melalui organisasi seperti Barisan Tani Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Gerwani. Keberhasilan PKI pada periode ini merupakan hasil pembelajaran dari kegagalan pemberontakan 1926-1927 dan Peristiwa Madiun 1948, sehingga partai lebih fokus pada konsolidasi politik dan pendidikan massa. Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), PKI mencapai puncak kekuatan dengan jutaan anggota. Perkembangan besar PKI tidak lepas dari masih kuatnya ketimpangan sosial, yang sejak masa kolonial sudah menjadi bahan bakar utama penyebaran ideologi komunis. Dengan basis buruh dan petani yang besar, PKI mampu menempatkan diri sebagai salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Blok Timur.



## **B. Faktor Penyebab Pemberontakan PKI Pada Masa Pergerakan Nasional**

---

Pemberontakan PKI pada tahun 1926-1927 tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi dan politik global yang berkembang setelah Perang Dunia I. Krisis kapitalisme internasional yang disusul dengan depresi ekonomi pada tahun 1920-1921 memberikan dampak signifikan terhadap Hindia Belanda. Penurunan produksi, meningkatnya pengangguran, serta memburuknya kesejahteraan rakyat memperlebar kesenjangan sosial antara pemerintah kolonial dan masyarakat pribumi (Rachman, 2022). Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan luas di kalangan buruh dan rakyat kecil, sehingga menciptakan situasi yang kondusif bagi tumbuhnya gerakan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Dalam konteks tersebut, PKI berupaya memobilisasi kaum buruh melalui berbagai aksi pemogokan sebagai bentuk perjuangan ekonomi dan politik. Namun, serangkaian pemogokan besar yang dipimpin PKI, seperti pemogokan buruh pegadaian pada tahun 1922 dan pemogokan buruh perkeretaapian pada tahun 1923, berakhir dengan kegagalan. Kegagalan ini tidak hanya melemahkan posisi PKI di hadapan pemerintah kolonial, tetapi juga menimbulkan frustrasi politik di kalangan pimpinan dan kader partai. Situasi tersebut mendorong terjadinya pergeseran strategi perjuangan, dari pendekatan ekonomi dan aksi massa yang bersifat legal menuju pilihan perlawanan yang lebih radikal, termasuk penggunaan kekerasan bersenjata.

Tekanan terhadap PKI semakin meningkat seiring dengan kebijakan represif yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Aparat kolonial melakukan penangkapan dan pengasingan terhadap tokoh-tokoh PKI, membubarkan organisasi-organisasi yang dianggap radikal, serta melarang penerbitan media yang menyuarakan ide-ide revolusioner. Selain itu, pemerintah juga melakukan penyisiran di kawasan permukiman buruh dan melakukan intimidasi terhadap serikat-serikat buruh. Represi yang sistematis ini mempersempit ruang gerak politik yang legal bagi PKI, sehingga memperkuat kecenderungan partai untuk memilih jalur perlawanan di luar mekanisme hukum kolonial. Akibat tekanan yang terus-menerus, basis organisasi dan massa PKI mengalami kehancuran yang signifikan. Organisasi-organisasi pendukung seperti Sarekat Rakyat dan Vereeniging van Spoor-en Tramwegpersoneel (VSTP) mengalami pembubaran atau pelemahan yang serius (Ismail & Sulisty, 2024). Kondisi ini membuat perjuangan terbuka menjadi semakin sulit dilakukan dan mendorong munculnya tindakan-tindakan perlawanan yang bersifat konfrontatif dan ilegal. Dalam situasi terdesak tersebut, pilihan pemberontakan mulai dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk melawan kekuasaan kolonial.

Di sisi internal, PKI juga menghadapi persoalan konsolidasi organisasi. Pelonggaran disiplin partai dan ditinggalkannya prinsip sentralisme demokrasi menyebabkan



cabang-cabang PKI di daerah bergerak secara relatif mandiri tanpa koordinasi yang kuat dari pimpinan pusat (Anugrah et al., 2022). Lemahnya pengendalian organisasi ini memunculkan aksi-aksi lokal yang sporadis dan tidak terkoordinasi, yang pada akhirnya mempercepat eskalasi konflik dengan pemerintah kolonial dan memperbesar peluang terjadinya pemberontakan berskala luas. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh berbagai kebijakan kolonial yang bersifat provokatif dan memperuncing konflik. Pemerintah Hindia Belanda melarang keberadaan sekolah-sekolah rakyat yang dikelola organisasi pergerakan, menutup sekolah liar, serta melakukan pengeledahan terhadap kantor-kantor organisasi politik. Selain itu, pembentukan kelompok-kelompok preman seperti Sarekat Hedjo untuk menghadapi aktivis pergerakan turut memicu kemarahan rakyat. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya memperkuat sentimen anti-kolonial, tetapi juga mendorong aksi balasan yang semakin sulit dikendalikan.

Akumulasi penindasan ekonomi dan politik yang dialami rakyat pada akhirnya memunculkan kemarahan yang meluas di kalangan buruh, petani, dan masyarakat kecil. Ketidakadilan kolonial yang berlangsung dalam jangka panjang menimbulkan kesadaran bahwa jalur perjuangan damai dan legal tidak lagi efektif. Dalam konteks inilah pemberontakan mulai dipandang oleh sebagian kader dan massa PKI sebagai jalan keluar terakhir untuk melawan dominasi kolonial dan memperjuangkan perubahan sosial yang radikal. Puncak dari rangkaian faktor tersebut adalah keputusan politik PKI untuk melancarkan pemberontakan bersenjata. Keputusan ini diambil dalam Konferensi PKI di Prambanan pada bulan Desember 1925, yang secara resmi menetapkan rencana pemberontakan guna menggulingkan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Putusan Prambanan menjadi faktor langsung yang mengarahkan gerakan PKI menuju pemberontakan tahun 1926-1927. Dalam pelaksanaannya, pemberontakan PKI 1926-1927 tidak berlangsung secara serentak di seluruh wilayah Hindia Belanda, melainkan terkonsentrasi di beberapa daerah tertentu. Pemberontakan 1926 terjadi pada 13 November di pulau Jawa yang meliputi Banten, Batavia, Priangan, Surakarta, Banyumas, Kediri Dan Pekalongan. Sementara gelombang berikutnya terjadi di Sumatera Barat, khususnya di wilayah Silungkang, Padang Panjang, dan sekitarnya pada 1 Januari 1927 (Anugrah et al., 2022). Daerah-daerah tersebut dipilih karena memiliki basis buruh, petani, dan jaringan organisasi PKI yang relatif kuat.

Bentuk pemberontakan yang dilakukan meliputi penyerangan terhadap aparat kolonial, penguasaan kantor pemerintahan, pemutusan jalur komunikasi, serta upaya pembentukan kekuasaan rakyat di tingkat lokal. Meskipun akhirnya gagal, pemberontakan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perlawanan kiri dan mempertegas sikap represif negara kolonial terhadap gerakan komunis di Indonesia (Lady Andres, n.d.)



## **C. Dampak Pemberontakan PKI 1926-1927**

---

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1926-1927 membawa dampak besar terhadap perkembangan politik Indonesia pada masa pergerakan nasional. Peristiwa ini mendorong perubahan sikap pemerintah kolonial Hindia Belanda yang semakin represif terhadap gerakan politik pribumi. PKI dipandang sebagai ancaman serius karena mengusung ideologi revolusioner dan memiliki keterkaitan dengan komunisme internasional. Setelah pemberontakan gagal, pemerintah kolonial membubarkan PKI, menangkap para pemimpinnya, serta membuang banyak aktivis ke Boven Digul. Kebijakan represif tersebut tidak hanya bertujuan menghentikan pemberontakan, tetapi juga dimaksudkan untuk membatasi penyebaran ideologi komunisme dan menekan berkembangnya gerakan politik radikal di kalangan rakyat (McVey, 2019; Ricklefs, 2008).

Selain berdampak pada kebijakan politik kolonial, pemberontakan PKI 1926-1927 juga menyebabkan runtuhnya PKI sebagai kekuatan politik penting dalam pergerakan nasional. Kegagalan pemberontakan ini disebabkan oleh lemahnya dukungan rakyat, kurangnya koordinasi internal, serta ketidaksesuaian strategi revolusi bersenjata dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia (Anugrah et al., 2022). Situasi tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan perjuangan yang meniru model revolusi internasional tidak dapat diterapkan secara langsung di Indonesia. Dalam konteks pergerakan nasional, kegagalan PKI justru memperkuat posisi kelompok nasionalis yang menekankan persatuan bangsa sebagai dasar utama perjuangan kemerdekaan (Kahin, 2018).

Dari sisi sosial, penindakan pasca pemberontakan menimbulkan suasana ketakutan dan kecurigaan di tengah masyarakat. Banyak warga yang tidak terlibat langsung tetap mengalami tekanan sosial, pengawasan, bahkan penangkapan karena dicurigai sebagai simpatisan komunis. Kondisi ini memperkuat stigma negatif terhadap ideologi komunisme yang kemudian dipandang sebagai ideologi yang identik dengan kekerasan dan kekacauan sosial (Anugrah et al., 2022). Selain itu, konflik ideologis antara PKI dan kelompok Islam, khususnya Sarekat Islam, memperdalam perpecahan sosial di kalangan rakyat dan melemahkan solidaritas antar kelompok pergerakan (McVey, 2019).

Pemberontakan PKI 1926-1927 menjadi pengalaman historis penting yang memengaruhi arah pemikiran dan strategi perjuangan bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional. Peristiwa ini menyadarkan banyak tokoh pergerakan bahwa perjuangan kemerdekaan harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang religius dan menjunjung tinggi persatuan. Oleh karena itu, meskipun pemberontakan PKI 1926-1927 gagal mencapai tujuannya,



dampaknya sangat besar dalam membentuk pola perjuangan politik, relasi sosial, dan kesadaran ideologis bangsa Indonesia menuju Indonesia merdeka (Ricklefs, 2008).

## **D. Rangkuman**

---

Kemunculan dan perkembangan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak dapat dilepaskan dari konteks kolonial Hindia Belanda yang ditandai oleh ketimpangan sosial, eksploitasi ekonomi, dan keterbatasan ruang politik bagi rakyat pribumi. Ideologi komunisme hadir sebagai respons atas kondisi struktural tersebut, dengan menawarkan gagasan perjuangan kelas yang menarik bagi kaum buruh dan petani sebagai kelompok yang paling terdampak oleh sistem kolonial. Masuknya komunisme ke Indonesia dipengaruhi oleh arus pemikiran global yang dibawa oleh kaum sosialis Eropa, yang kemudian mengalami proses indigenisasi melalui keterlibatan tokoh-tokoh pribumi seperti Semaun, Darsono, dan Alimin.

Transformasi Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920 menandai lahirnya PKI sebagai kekuatan politik yang secara terbuka mengusung ideologi komunisme. Dalam perkembangannya, PKI berupaya membangun basis massa melalui pengorganisasian buruh dan petani, serta mengadopsi strategi perjuangan yang semakin radikal akibat tekanan dan represi pemerintah kolonial. Pemberontakan PKI tahun 1926-1927 merupakan puncak dari akumulasi ketegangan ekonomi, politik, dan organisasi, baik yang bersumber dari krisis global pasca Perang Dunia I maupun dari kebijakan represif kolonial yang mempersempit ruang gerak politik legal. Kegagalan pemberontakan tersebut membawa dampak penting terhadap arah pergerakan nasional. Secara politik, pemerintah kolonial memperketat pengawasan dan penindasan terhadap gerakan radikal, sementara PKI mengalami kehancuran sebagai kekuatan terbuka dan harus bergerak secara bawah tanah. Secara sosial, peristiwa ini menimbulkan trauma, stigma, dan polarisasi ideologis di tengah masyarakat, khususnya antara kelompok komunis dan organisasi keagamaan. Namun demikian, pemberontakan 1926-1927 juga memberikan pelajaran penting bagi dinamika pergerakan nasional, yaitu bahwa strategi perjuangan harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia serta menempatkan persatuan nasional sebagai landasan utama perjuangan kemerdekaan.

Dengan demikian, kajian ini menunjukkan bahwa PKI dan pemberontakannya pada masa pergerakan nasional merupakan bagian integral dari sejarah konflik ideologis di Indonesia. Meskipun gagal mencapai tujuan revolusionernya, PKI berkontribusi



dalam membentuk kesadaran politik rakyat dan memengaruhi arah strategi perjuangan nasional, sekaligus memperlihatkan kompleksitas hubungan antara ideologi global dan realitas lokal dalam sejarah politik Indonesia.



# BAB 4

## NU DAN MUHAMMADIYAH DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA (1912–1945)

*Santy Rahmawati, Restu Aulia Amanda, Azka Prastyo*

Perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan merupakan hasil dari proses historis panjang yang melibatkan berbagai aktor sosial, politik, intelektual, dan keagamaan. Selain perjuangan bersenjata, kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi gerakan masyarakat sipil (*civil society*) yang membangun kesadaran nasional melalui pendidikan, organisasi, dakwah, dan advokasi sosial. Di antara aktor non-negara yang memiliki pengaruh besar adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keduanya memainkan peran strategis dalam membentuk identitas keislaman yang berpadu dengan nasionalisme serta memperkuat basis sosial umat dalam menghadapi kolonialisme (Hamami, 2021).

NU dan Muhammadiyah lahir pada awal abad ke-20 dalam konteks meningkatnya kesadaran nasional, pertumbuhan kelas terpelajar, penetrasi pendidikan kolonial, dan masuknya wacana modernisme Islam dari Timur Tengah (A. R. M. R. S. R. S. F. Saputra & Nduru5, 2025). Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan sebagai gerakan pembaruan Islam (*tajdid*) yang menekankan purifikasi ajaran agama, pendidikan modern, dan penguatan amal sosial. Sementara itu, NU didirikan pada tahun 1926 oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai wadah ulama pesantren untuk menjaga tradisi keilmuan Ahlusunnah wal Jama'ah dan mempertahankan praktik keagamaan tradisional di tengah arus modernisasi dan kolonialisme. Meskipun berbeda dalam pendekatan keagamaan, keduanya sama-sama berkontribusi dalam membangun kesadaran politik umat dan memperkuat jaringan sosial yang menjadi basis penting perjuangan nasional.

Kontribusi kedua organisasi tidak hanya berlangsung sebelum proklamasi kemerdekaan, tetapi juga pada masa pembentukan negara dan konsolidasi nasional (Wahyuni & Mursal, 2022). Tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Mas Mansur, dan K.H. Fakih Usman terlibat dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), serta berperan dalam perumusan ideologi negara dan konsensus kebangsaan. Menurut (Juma, 2022) sementara itu, NU memainkan peran moral-spiritual penting melalui fatwa dan seruan jihad, terutama Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang memberikan legitimasi religius bagi mobilisasi rakyat mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda.



Peran-peran tersebut memperlihatkan bagaimana gerakan keagamaan dapat bersinergi dengan tujuan politik nasionalisme tanpa menimbulkan kontradiksi ideologis.

Kajian mengenai NU dan Muhammadiyah dalam perjuangan kemerdekaan penting dilakukan karena dua alasan utama. Pertama, sebagian besar studi sejarah kemerdekaan cenderung menitikberatkan pada aktor negara dan militer, sehingga peran civil society keagamaan sering terabaikan dalam narasi historiografi arus utama. Kedua, pemahaman mengenai kontribusi organisasi keagamaan dalam konteks pembentukan kebangsaan relevan bagi situasi kontemporer, terutama ketika isu relasi agama dan negara kembali menguat di ruang publik. Dengan memahami sejarah keterlibatan NU dan Muhammadiyah, dapat dipahami bahwa nasionalisme religius di Indonesia tidak bersifat eksklusif, melainkan terbuka, moderat, dan inklusif terhadap pluralitas bangsa (Anggraini & Yola, 2024).



Gambar 19. Dua tokoh penting gerakan Islam Indonesia

Sumber:

<https://www.google.com/imgres?imgurl=https://assetsa1.kompasiana.com/items/album/2021/06/25/nu-muhamadiyah>

## A. Nahdlatul Ulama

---

Nahdlatul Ulama (NU) lahir pada tahun 1926 dalam konteks transformasi sosial dan keagamaan yang melanda dunia Islam awal abad ke-20 (Ulum & Wahid, 2019). Kebangkitan pan-Islamisme, masuknya gerakan pembaruan Islam dari Timur Tengah, penetrasi kolonialisme Eropa, serta perdebatan mengenai otoritas keagamaan mendorong ulama pesantren untuk mengonsolidasikan diri dalam suatu organisasi. (Indragiri, 2025) menyatakan bahwa NU merupakan respons



kreatif ulama tradisional terhadap dua tekanan: pertama, modernisasi sosial-keagamaan, dan kedua, perubahan struktur otoritas Islam akibat kolonialisme.

Secara ideologis, NU lahir untuk mempertahankan tradisi keilmuan Islam Ahlusunnah wal Jama'ah yang di dalamnya mencakup aspek fikih mazhab, tasawuf, dan teologi Asy'ariyah Maturidiyah. Struktur ini merupakan jaringan keilmuan pesantren yang berakar pada pusat-pusat pendidikan Islam di Timur Tengah seperti Makkah dan Hadramaut (Wahyuni & Mursal, 2022). Dengan demikian, NU tidak lahir sebagai organisasi reaksioner semata, melainkan sebagai motor kultural yang membawa otoritas keagamaan pesantren ke ranah publik.

Momentum pendirian NU juga tidak terlepas dari dinamika global, terutama keputusan Pemerintah Saudi yang menghapus mazhab-mazhab fikih dalam sistem keagamaan setelah ekspansi kekuasaan Wahhabi. KH. Wahab Chasbullah dan sejumlah ulama Nusantara yang sedang menuntut ilmu di Makkah mendorong pembentukan organisasi yang mampu memperjuangkan kepentingan umat di tingkat internasional. Dari sini dapat disimpulkan bahwa NU muncul dalam ruang interaksi antara wacana internasional dan nasional.

## **Peran NU dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia**

Keikutsertaan Nahdlatul Ulama (NU) dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak dapat direduksi sekadar pada dimensi religius-keagamaan, tetapi harus dipahami sebagai gerakan multidimensi yang beroperasi dalam ranah kultural, sosial-ekonomi, politik, hingga militer-moral. Sejumlah studi akademik menunjukkan bahwa kontribusi tersebut berlangsung dalam struktur sosial pesantren yang memiliki basis massa kuat di pedesaan serta memiliki otoritas simbolik yang tinggi di mata umat Islam (Farid, 2016).

### **1. Dimensi Keagamaan dan Kultural**

Perlawanan keagamaan terhadap kolonialisme bukan fenomena baru dalam tradisi Islam Nusantara. Namun, posisi NU menjadi penting karena organisasi ini berhasil mengartikulasikan gagasan jihad dalam konteks kebangsaan modern. Pesantren berfungsi sebagai *cultural fortress* (Fealy, 2009) yakni benteng budaya yang memproduksi identitas kolektif anti kolonial dan mengintegrasikan kepatuhan religius dengan nasionalisme.

Selain itu, pendidikan pesantren menanamkan habitus sosial berupa kedisiplinan, loyalitas, dan kepatuhan pada otoritas ulama. Habitus ini memungkinkan terbentuknya mobilisasi akar rumput yang efektif. Mobilisasi ini bukan hanya



bersifat spontan, tetapi terorganisir melalui jaringan kiai santri yang saling terhubung secara kultural dan genealogis. Dalam perspektif teori gerakan sosial, jaringan pesantren dapat dipandang sebagai bentuk mobilizing structure (Hannan & Abdillah, 2019) yang menyediakan instrumen pengorganisasian massa sebelum dan setelah kemerdekaan.

Lebih jauh, Islam tradisional ala pesantren juga membangun resistensi simbolik melalui wacana kemuliaan martabat umat, penolakan terhadap dominasi asing, serta dukungan terhadap tatanan politik yang adil. Hal ini memperkuat justifikasi moral bahwa kolonialisme bukan saja penindasan politik, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai agama.

## **2. Dimensi Sosial Ekonomi dan Organisasi Umat**

Kontribusi NU dalam bidang ekonomi umat telah muncul jauh sebelum NU secara formal berdiri pada 1926. Organisasi ekonomi seperti Nahdlatut Tujjar (1918) dan Nahdlatul Wathan (1916) dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Muslim sebagai bentuk resistensi terhadap kapitalisme kolonial. Dalam kajian Boland (1982), inisiatif-inisiatif ini dipandang sebagai bentuk *proto civil society*, yakni embrio masyarakat madani yang menyiapkan basis sosial bagi gerakan Islam modern di Indonesia.

Program-program ini penting karena kolonialisme Belanda memonopoli komoditas dan perdagangan sehingga umat Islam diposisikan sebagai kelompok perifer secara ekonomi. Kemandirian ekonomi kemudian menjadi narasi religious nasionalis yang memperkuat legitimasi perjuangan politik.

NU juga membangun jaringan pendidikan, dakwah, dan filantropi yang memperkuat solidaritas sosial. (Razi, 2011) menunjukkan bahwa integrasi antara jaringan ulama Nusantara, ekonomi pesantren, dan tradisi filantropi Islam membentuk infrastruktur sosial yang mempercepat tumbuhnya kesadaran kolektif tentang bangsa (*national consciousness*).



### 3. Dimensi Politik dalam Gerakan Kebangsaan

Secara historiografis, pandangan bahwa NU bersifat apolitis adalah keliru. NU terlibat aktif dalam organisasi politik Islam maupun nasionalis sejak masa kolonial. Keterlibatan NU dalam MIAI (1937) dan kemudian Masyumi pada masa pendudukan Jepang menunjukkan bahwa strategi politik NU bersifat gradual dan pragmatis. Melalui GAPI (Gabungan Politik Indonesia), NU juga terlibat dalam kampanye “Indonesia Berparlemen” pada 1939 yang merupakan salah satu tuntutan paling progresif dalam demokratisasi kolonial.

Studi (Muhammad, 2015) menyebut strategi NU sebagai moral politics, yakni politik yang berlandaskan etika keagamaan dan kepentingan kolektif umat, bukan politik elektoral dalam pengertian modern. Ini menjelaskan mengapa NU dapat memainkan peran penting tanpa harus muncul sebagai aktor partisan tunggal.

### 4. Dimensi Militer Moral melalui Resolusi Jihad

Kontribusi militer NU mencapai puncaknya setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 melalui Resolusi Jihad yang dikeluarkan KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. Resolusi ini menetapkan bahwa mempertahankan tanah air dari agresi Belanda merupakan fardhu ‘ain, kewajiban individu bagi umat Islam. Resolusi tersebut berimplikasi pada meningkatnya mobilisasi laskar santri, *Hizbullah* dan *Sabilillah*, serta menjadi legitimasi teologis bagi Pertempuran Surabaya 10 November 1945 yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan.

Menurut (I. Saputra, 2019), Resolusi Jihad merupakan tindakan politik sekaligus keagamaan karena menghasilkan *moral grammar* bagi tindakan militer. Ini menunjukkan bahwa perjuangan fisik memperoleh daya dorong bukan hanya dari nasionalisme sekuler, tetapi juga spiritualitas religius.

Dalam kajian perang Surabaya tidak dapat dipahami tanpa melihat peran pesantren sebagai pusat mobilisasi massa, pengadaan logistik, hingga transmisi fatwa keagamaan dalam bahasa yang dipahami rakyat.

### Kontribusi NU dalam Nation Building Pasca Kemerdekaan

Kontribusi NU tidak berhenti pada tahap mempertahankan kemerdekaan, tetapi berlanjut dalam pembentukan negara. NU terlibat dalam:

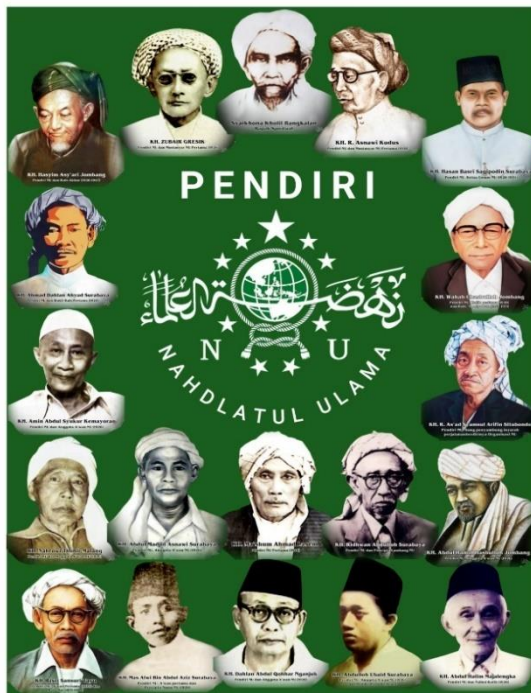
- perdebatan dasar negara
- pembentukan konstitusi



- pendidikan politik umat
- konsolidasi integrasi nasional

Tokoh seperti KH. Wahid Hasyim memainkan peran penting dalam Kementerian Agama, termasuk dalam kebijakan pendidikan keagamaan nasional dan diplomasi keagamaan luar negeri.

(A. R. M. R. S. R. S. F. Saputra & Nduru5, 2025) menyebutkan bahwa NU merupakan aktor penting dalam pembentukan “Islam kebangsaan Indonesia” yang menekankan kompatibilitas Islam dengan pluralisme dan negara-bangsa.



Gambar 20. Para tokoh pendiri Nahdlatul Ulama  
 Sumber: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Pendiri\\_Nahdlatul\\_Ulama](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Pendiri_Nahdlatul_Ulama).



## **B. Organisasi Masyarakat Muhammadiyah**

---

Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta dalam konteks kebangkitan modernisme Islam awal abad ke-20 (Miswanto & Arofi, 2015). Gerakan ini terpengaruh oleh gagasan pembaruan keagamaan dari Timur Tengah, khususnya pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha yang menekankan rasionalitas, purifikasi ajaran, dan pentingnya pendidikan modern. (Nurhayati et al., 2019) menyebut Muhammadiyah sebagai representasi arus modernisme Islam yang menghubungkan tradisi keilmuan Islam dengan logika modernitas.

Faktor internal seperti rendahnya kualitas pendidikan umat, penetrasi praktik keagamaan sinkretis, dan keterbelakangan sosial-ekonomi juga menjadi pendorong utama kelahiran Muhammadiyah. Dalam pandangan Noer (1996), Muhammadiyah merupakan respons terhadap krisis umat sekaligus upaya memperbaiki struktur sosial melalui pendidikan dan amal usaha. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah sejak awal bukan sekadar organisasi keagamaan, melainkan gerakan sosial-transformasional.

### **1. Pendidikan dan Amal Usaha sebagai Strategi Perjuangan**

Perjuangan Muhammadiyah dalam konteks nasionalisme ditempuh melalui jalur kultural struktural, terutama melalui pendidikan modern dan sistem kelembagaan. Pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis untuk membentuk manusia cerdas, rasional, dan berjiwa kebangsaan. Sekolah-sekolah Muhammadiyah mengadopsi sistem kelas, kurikulum, dan administrasi modern, dengan integrasi ilmu agama dan ilmu umum (Rusydi, 2016).

Melalui lembaga pendidikan dan kesehatan, Muhammadiyah berhasil membangun basis sosial lintas kelas dan mencetak generasi baru Muslim terdidik yang kelak menjadi bagian dari elite nasional. (UMA, 2013) menyebut bahwa model amal usaha Muhammadiyah merupakan bentuk awal civil Islam yang berkontribusi pada pembangunan negara.

Kontribusi sosial ini bersifat sistematis dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, terutama melalui:

- sekolah modern
- balai pengajian



- rumah sakit
- panti asuhan
- organisasi perempuan (Aisyiyah)
- organisasi pemuda

Pembentukan amal usaha ini dianggap sebagai bentuk perlawanan struktural terhadap kolonialisme, karena melemahkan kontrol kolonial atas akses pendidikan dan kesehatan yang sebelumnya dimonopoli oleh pemerintah kolonial dan misi Kristen.

## 2. Kontribusi Politik Muhammadiyah dalam Proses Kemerdekaan

Berbeda dengan NU yang lebih mengandalkan otoritas ulama dan basis pesantren, Muhammadiyah berkontribusi dalam proses perjuangan kemerdekaan melalui jalur politik kenegaraan dan konstitusional. Tokoh Muhammadiyah berperan dalam forum-forum penting pembentukan negara, seperti:

- BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
- PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
- KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat)

Tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo memainkan peran sentral dalam perdebatan ideologi dasar negara, khususnya terkait perumusan Piagam Jakarta dan sila Ketuhanan. (Tanthowi, 2019) menyebut Ki Bagus sebagai figur penting dalam kompromi nasional untuk menjaga persatuan Indonesia melalui penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945 (Azam, 2025). Keputusan tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah memprioritaskan keutuhan bangsa di atas kepentingan ideologis kelompok.

Selain itu, K.H. Mas Mansur sebagai bagian dari Kelompok Empat (Besar) dalam masa pendudukan Jepang memanfaatkan ruang politik untuk mempersiapkan kader bangsa melalui organisasi seperti Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Walaupun program-program Jepang memiliki agenda propaganda, tokoh-tokoh Muhammadiyah melakukan taktik *political maneuvering* untuk kepentingan nasional.



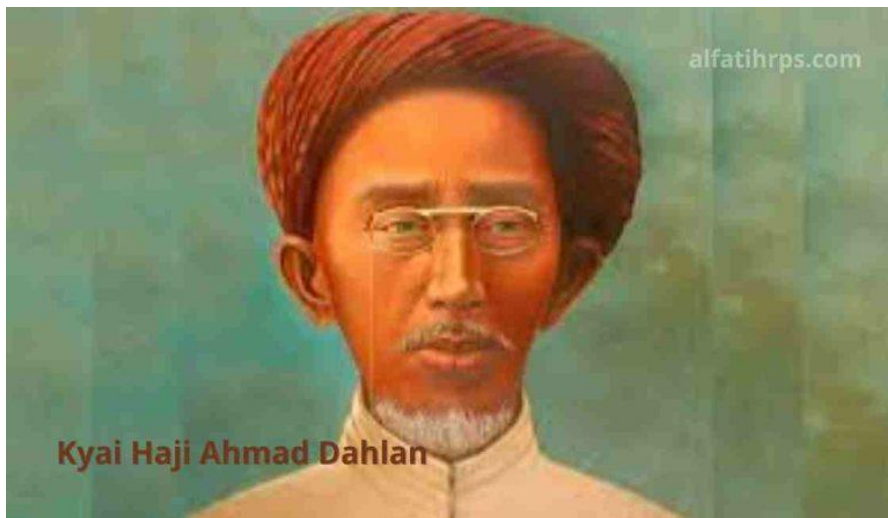
### 3. Muhammadiyah sebagai Penggerak Nasionalisme Modern

Muhammadiyah turut membentuk karakter nasionalisme Indonesia yang berbeda dari model sekuler-liberal Eropa maupun Islamisme eksklusif ala Timur Tengah. Menurut Barton (2014), nasionalisme yang dibentuk Muhammadiyah adalah nasionalisme modern berbasis moral keagamaan, yang menekankan:

1. kemajuan (*progress*)
2. rasionalitas (*reason*)
3. amal sosial (*service*)
4. keadaban (*civility*)

Pendidikan modern yang dikembangkan Muhammadiyah mencetak kader bangsa yang terlibat dalam berbagai sektor setelah kemerdekaan, antara lain: birokrasi, pendidikan tinggi, kesehatan, media, dan diplomasi.

Dalam perspektif (Huda & Kusumawati, 2019), Muhammadiyah berfungsi sebagai *cultural producer* yang menciptakan wacana Islam modern dalam kehidupan publik. Hal ini menjadikan Muhammadiyah sebagai pilar penting dalam memperkuat civil society Indonesia pada fase awal nation-building.



Gambar 21. Gambar tokoh pembaruan pendidikan Islam pada awal abad ke-20 di Indonesia  
Sumber: <https://www.google.com/imgres?imgurl=https://alfatihrps.com/wp-content/uploads/2024/01/Kyai-Haji-Ahmad-Dahlan/>



## C. Rangkuman

---

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi Islam terbesar yang menjadi aktor penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meski berbeda dalam pendekatan teologis dan strategi perjuangan, keduanya berkontribusi secara signifikan dalam pembentukan kesadaran nasional dan proses nation-building.

NU yang lahir pada 1926 muncul dari rahim pesantren, sebagai respons terhadap modernisasi keagamaan, tekanan kolonial, dan dinamika otoritas ulama global. NU memperkuat basis sosial pedesaan melalui pesantren, jaringan ekonomi umat, serta mobilisasi keagamaan. Kontribusi NU terutama tampak pada aspek moral-militer melalui Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang memberikan legitimasi teologis bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pasca-proklamasi, NU juga terlibat dalam konsolidasi negara melalui pendidikan politik umat dan kebijakan dalam sektor agama.

Sementara itu, Muhammadiyah yang berdiri pada 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan tampil sebagai gerakan pembaruan Islam modernis yang menekankan purifikasi ajaran agama, pendidikan modern, dan pemberdayaan sosial. Strategi perjuangannya bersifat struktural-kultural melalui pendirian sekolah, rumah sakit, organisasi perempuan, dan amal usaha lainnya yang memperkuat basis civil society. Dalam proses politik menuju kemerdekaan, tokoh Muhammadiyah turut serta dalam BPUPKI, PPKI, dan KNIP serta terlibat dalam perumusan dasar negara. Sikap kompromi Ki Bagus Hadikusumo dalam proses perubahan Piagam Jakarta menunjukkan orientasi Muhammadiyah pada keutuhan bangsa dan nasionalisme inklusif.

# BAB 5

## PNI DAN PERJALANAN PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA (1927-1955)

*Soni Ramdani, Fakhir Elyanda Fadhlurrahman, Widie Dwitami Sukendari*

Pergerakan Nasional Indonesia, yang berlangsung sejak awal abad ke-20, menandai fase penting dalam sejarah Indonesia karena menandai kebangkitan kesadaran kolektif rakyat Indonesia sebagai negara berdaulat. Saat ini, berbagai organisasi politik dan kebangsaan muncul dan berkembang untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dan menentang penjajahan Belanda. Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah salah satu organisasi nasionalis yang paling berpengaruh dalam perjuangan politik nasionalis (Suryanegara, 2010).

Pada masa itu, pergerakan nasional berubah dari pergerakan sosial budaya menjadi perjuangan politik yang lebih kompleks. PNI memainkan peran strategis dalam mobilisasi massa, menyebarkan ide-ide nasionalisme, dan mempromosikan pendidikan politik. Banyak orang menjadi anggota PNI dalam waktu singkat, menunjukkan bahwa mereka sangat mendukung kemerdekaan dan semangat persatuan di tengah tekanan kolonial (Eef Saefullah, Topan Adi Saputra, & Dede Komariyah, 2025). Namun, dinamika internal dan tekanan eksternal memengaruhi operasi organisasi ini hingga pecah pada awal 1930-an, menunjukkan kompleksitas masalah pergerakan nasional Indonesia saat itu.

Partai Nasional Indonesia (PNI) bukan hanya organisasi politik itu juga membantu menumbuhkan identitas nasional dan kesadaran rakyat Indonesia tentang perjuangan mereka melawan kolonialisme. PNI berusaha menanamkan keyakinan bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui persatuan semua orang tanpa memandang latar belakang sosial atau agama mereka. PNI tidak hanya melibatkan pergerakan intelektual elit, tetapi juga melibatkan masyarakat umum melalui propaganda politik, pendidikan, dan pembinaan kader. Dengan demikian, PNI berperan sebagai penggerak utama dalam proses politisasi rakyat Indonesia selama pergerakan nasional. PNI menghadapi represi keras dari pemerintah kolonial, tetapi tetap memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan organisasi pergerakan selanjutnya. Selain itu, ia menjadi dasar bagi nasionalisme Indonesia kontemporer (Eef Saefullah, Topan Adi Saputra, & Dede Komariyah, 2025).

Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai organisasi politik yang bertempur di masa kolonial, tetapi juga dikenal sebagai pembawa strategi politik yang inklusif dan antikolonial di Indonesia. PNI mengembangkan pendekatan yang memungkinkan partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk intelektual, buruh,



perempuan, dan pemuda, dalam memperjuangkan tujuan nasionalisnya. Pendekatan inklusif ini terlihat dalam upaya PNI untuk membangun jaringan cabang di berbagai daerah, menyelenggarakan pendidikan politik, dan melakukan pemboikotan terhadap lembaga kolonial sebagai bentuk solidaritas. Meskipun PNI dibubarkan pada awal 1930-an karena tekanan pemerintah kolonial Belanda, strategi ini juga memperkuat solidaritas nasional dan menumbuhkan semangat solidaritas dalam menghadapi tantangan kolonial (Saripulloh dkk., 2025).

Studi sejarah kontemporer Indonesia menemukan bahwa Partai Nasional Indonesia (PNI) bukan hanya organisasi politik; itu juga merupakan manifestasi dari nasionalisme politik yang muncul menjelang akhir era kolonial. Sejak tahun 1920-an, kesadaran nasional mulai diwakili oleh kelompok-kelompok yang secara terbuka dan sistematis menentang kekuasaan kolonial Belanda. Ini mengarah pada pembentukan PNI sebagai wadah perjuangan politik untuk menuntut kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Indonesia. Menurut Ricklefs dalam buku *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, wacana nasionalisme selama periode ini mengalami pergeseran dari orientasi pendidikan dan kultural menuju perjuangan politik yang lebih radikal. PNI memainkan peran penting dalam memperluas basis dukungan rakyat untuk kemerdekaan. PNI dianggap penting dalam politik kolonial berdasarkan pendekatan historis ini akhir yang tidak hanya menantang kekuatan asing, tetapi juga membantu memperkuat identitas nasional Indonesia (Ricklefs, 2005).

Selain itu, keberadaan Partai Nasional Indonesia (PNI) menunjukkan pergeseran gaya perlawanan rakyat Indonesia dari perlawanan lokal dan kedaerahan ke perjuangan politik yang lebih nasional. PNI menjadi simbol pergeseran strategi pergerakan nasional dalam konteks ini, dengan menekankan pentingnya kesadaran politik, persatuan nasional, dan kemandirian nasional untuk melawan kolonialisme. Ricklefs berpendapat bahwa munculnya partai politik modern seperti PNI pada dekade 1920-an menandai fase baru dalam sejarah pergerakan nasional. Pada periode ini, tuntutan kemerdekaan tidak lagi disampaikan secara diam-diam, tetapi secara terbuka dan konfrontatif terhadap kekuasaan kolonial. Ideologi dan semangat nasionalisme tetap hidup dan memengaruhi perjuangan politik Indonesia di masa depan, meskipun PNI mengalami tekanan yang signifikan melalui penangkapan tokoh-tokohnya dan pembubaran organisasinya (Ricklefs, 2005).

Pidato Indonesia Menggugat merupakan peristiwa penting dalam sejarah Partai Nasional Indonesia (PNI) dan pergerakan nasional Indonesia karena menunjukkan fungsi PNI sebagai organisasi politik dan sebagai tempat kritik tajam terhadap sistem kolonial yang menindas. Pada tahun 1930, Sukarno diadili di Pengadilan Landraad Bandung atas tuduhan hendak menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda, dan dia membacakan pidato pembelaan yang dikenal sebagai Indonesia



Menggugat (Sukarno, 1930). Dalam pidatonya, Sukarno mengemukakan secara tegas imperialisme dan kolonialisme serta menunjukkan penderitaan rakyat Indonesia sebagai akibat dari pemerintahan kolonial. Dia juga menegaskan bahwa perjuangan PNI didasarkan pada keyakinan bahwa kemerdekaan adalah hak bangsa Indonesia untuk memperjuangkan sendiri tanpa tawar-menawar dengan pemerintah asing, karena pidato itu menunjukkan keberanian politik para pemimpin PNI dan semangat nasionalisme dalam gerakan nasional, itu menjadi simbol perlawanan moral dan intelektual terhadap penjajahan yang sistematis dan mendorong semua orang untuk bersatu untuk menuntut kemerdekaan Indonesia (Sukarno, 1930).

Selain itu, Pidato Indonesia Menggugat dapat ditafsirkan sebagai kristalisasi ideologi perjuangan Partai Nasional Indonesia (PNI), yang menegaskan non-kooperasi sebagai jalan perjuangan dan menolak kompromi terhadap kolonialisme. Melalui pidato tersebut, Sukarno tidak hanya membela dirinya secara hukum, tetapi juga menggunakan pengadilan kolonial sebagai platform politik untuk mengemukakan kritik struktural terhadap struktur imperialisme Belanda. Perjuangan PNI didasarkan pada kesadaran ideologis yang kuat dan berpihak pada rakyat tertindas, seperti yang ditunjukkan oleh Indonesia Menggugat, yang menguraikan penderitaan rakyat, eksploitasi ekonomi, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, PNI tidak hanya berfungsi sebagai organisasi politik, tetapi juga sebagai gerakan ideologis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nasional dan keberanian politik rakyat Indonesia untuk memutuskan nasib mereka sendiri (Sukarno, 1930).

Partai Nasional Indonesia (PNI) tidak hanya memainkan peran penting dalam pergerakan nasional sebelum kemerdekaan, tetapi juga memainkan peran penting dalam struktur demokrasi Indonesia awal, terutama dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum pertama pada tahun 1955. Pemilu 1955 adalah momen penting dalam sejarah politik Indonesia karena menjadi pemilu langsung terbesar dalam sejarah negara, menjangkau pemilih hingga ke desa-desa terpencil. Dalam situasi ini, PNI tidak hanya berpartisipasi sebagai peserta, tetapi juga memperoleh suara terbanyak melalui strategi politik yang dipikirkan dengan baik. Partai ini melakukan konsolidasi politik secara internal dan eksternal, bekerja sama dengan berbagai partai dan kelompok lain, dan mendorong dukungan massa dengan menggunakan ide-ide marhaenisme dan nasionalisme. Selain itu, pertemuan terbuka dengan nasionalis yang terlibat dalam kampanye PNI menegaskan sifat perjuangan yang mengutamakan nilai kewarganegaraan dan solidaritas sosial dalam masyarakat yang heterogen (Pramestuti dkk., 2022).

Kesuksesan Partai Nasional Indonesia (PNI) dalam Pemilu 1955 menunjukkan korelasi antara ideologi perjuangan masa pergerakan nasional dan praktik politik di era negara merdeka. Setelah terbentuk melalui perlawanan terhadap



kolonialisme, nasionalisme kemudian berkembang menjadi kampanye politik yang menekankan koneksi dengan rakyat, penggunaan simbol nasional, dan cerita perjuangan kemerdekaan sebagai legitimasi politik. PNI membangun kepercayaan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat pedesaan dan kelompok marhaen, dengan memanfaatkan sejarahnya sebagai pelopor pergerakan nasional. Ini menunjukkan bahwa jati diri PNI sebagai partai pergerakan tidak hilang setelah kemerdekaan; sebaliknya, pada tahun 1950-an, itu berubah menjadi modal politik dalam sistem demokrasi parlementer Indonesia (Pramestuti dkk., 2022).

Secara keseluruhan, penelitian tentang sejarah Partai Nasional Indonesia (PNI) menunjukkan bahwa peran partai itu merupakan gambaran dari nasionalisme yang lebih luas yang berkembang sejak awal abad ke-20, bukan hanya organisasi politik. PNI muncul sebagai hasil dari perubahan kesadaran politik yang disebabkan oleh sistem kolonial yang tidak adil. Kemudian, PNI berhasil mengubah semangat perlawanan tersebut menjadi strategi politik yang efektif untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Ini melakukannya melalui berbagai fase, termasuk perjuangan ideologis, mobilisasi massa, pembelaan pidato Penggugat Indonesia, dan keterlibatan dalam demokrasi pascakemerdekaan seperti Pemilu 1955. Pandangan Kahin tentang Nationalism and Revolution in Indonesia menunjukkan bahwa Interaksi sosial, politik, dan budaya yang kompleks selama sejarah kolonial dan revolusioner Indonesia menciptakan nasionalisme Indonesia (Kahin, 1952).

## **A. Partai Nasional Indonesia**

---

Partai Nasional Indonesia (PNI) lahir pada 4 Juli 1927 di Bandung dengan nama awal Perserikatan Nasional Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh sejumlah tokoh muda terpelajar, yaitu Ir. Soekarno, Mr. Sartono, Dr. Cipto Mangunkusumo, Iskaq Tjokroadisurjo, dan Sunarjo Kolopaking. Para pendirinya merupakan kaum intelektual lulusan pendidikan Barat yang memiliki wawasan luas mengenai politik dan pergerakan nasional di berbagai negara. Setahun kemudian, pada tahun 1928, organisasi ini berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia untuk menegaskan orientasinya sebagai partai politik yang berjuang secara terbuka demi kemerdekaan Indonesia (Pramestuti et al., 2022)





Gambar 22. Ir. Soekarno, pendiri Partai Nasional Indonesia  
Sumber: Wikimedia Commons

Berdirinya PNI tidak terlepas dari perkembangan situasi sosial dan politik di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Pemerintah kolonial melaksanakan Politik Etis (Ethische Politiek) dengan dalih untuk menyejahterakan rakyat pribumi melalui “irigasi, edukasi, dan emigrasi.” Namun dalam kenyataannya, kebijakan tersebut hanya memberikan manfaat bagi kaum elite pribumi dan memperkuat kekuasaan kolonial. Sebaliknya, rakyat kecil tetap hidup dalam kemiskinan, penindasan, dan ketidakadilan sosial yang parah. Kesenjangan sosial inilah yang memunculkan kesadaran di kalangan kaum terpelajar untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem kolonial.

Di tengah kondisi tersebut, mulai tumbuh kesadaran nasional di kalangan pemuda dan kaum intelektual Indonesia. Pendidikan Barat yang diberikan kepada sebagian kecil rakyat pribumi justru menjadi alat pencerahan. Para pelajar Indonesia mulai mengenal gagasangagasan modern seperti kemerdekaan, kebangsaan, dan kedaulatan rakyat. Mereka mempelajari perjuangan bangsa lain seperti India, Mesir, dan Filipina yang tengah berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Kesadaran ini menumbuhkan keyakinan bahwa bangsa Indonesia pun memiliki hak yang sama untuk menentukan nasibnya sendiri.

Sebelum PNI berdiri, perjuangan nasional telah dimulai oleh organisasi seperti Budi Utomo (1908) dan Sarekat Islam (1912). Namun, organisasi-organisasi tersebut masih bersifat terbatas, baik dari segi keanggotaan maupun tujuan perjuangannya. Budi Utomo, misalnya, lebih berfokus pada bidang pendidikan dan kebudayaan, sementara Sarekat Islam masih terikat pada kepentingan ekonomi dan keagamaan. Melihat kenyataan tersebut, para pendiri PNI merasa perlu membentuk organisasi yang benar-benar berorientasi pada kemerdekaan nasional secara total dan tidak bergantung pada kekuasaan kolonial.



PNI kemudian hadir sebagai organisasi yang menggabungkan ide nasionalisme, sosialisme, dan anti-imperialisme dalam satu wadah politik. Soekarno dan rekan-rekannya percaya bahwa kemerdekaan tidak akan diberikan oleh penjajah, melainkan harus direbut melalui kekuatan dan kesadaran bangsa sendiri. Oleh sebab itu, PNI menempuh jalur nonkooperatif, yaitu menolak kerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Strategi ini dianggap lebih efektif untuk membangkitkan semangat perlawanan rakyat dan menanamkan rasa percaya diri sebagai bangsa yang mampu berdiri sendiri.

Seiring berdirinya PNI, semangat perjuangan nasional semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia. PNI menjadi pusat penggerak kebangkitan politik rakyat, khususnya di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pegawai pribumi. Melalui kegiatan rapat umum, penyuluhan, dan publikasi seperti surat kabar Suluh Indonesia Muda, PNI menyebarluaskan gagasan kemerdekaan dan persatuan nasional. PNI juga mendorong terbentuknya organisasi-organisasi pemuda di berbagai daerah yang sejalan dengan cita-cita perjuangannya, sehingga gerakan nasional semakin solid dan terarah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran Ir. Soekarno sebagai pemimpin PNI menjadi faktor penting dalam membesarkan organisasi ini. Dengan kemampuan retorika dan pemikiran politik yang tajam, Soekarno mampu menyatukan berbagai golongan masyarakat dan mengarahkan perjuangan menuju cita-cita kemerdekaan. Melalui tulisan-tulisannya dan pidato-pidatonya, seperti dalam kasus Indonesia Menggugat (1930), Soekarno berhasil menanamkan kesadaran bahwa penjajahan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental, dan harus dilawan melalui pendidikan serta persatuan nasional.

Dengan berdirinya PNI, perjuangan bangsa Indonesia memasuki babak baru yang lebih modern dan terorganisir. PNI menjadi wadah bagi lahirnya generasi pemimpin nasional yang berwawasan luas, berjiwa patriotik, dan berorientasi pada kemerdekaan sejati. Organisasi ini tidak hanya menumbuhkan semangat kebangsaan, tetapi juga menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak mutlak bangsa Indonesia yang harus diperjuangkan oleh rakyat sendiri tanpa kompromi dengan penjajah. Kehadiran PNI menjadi landasan kuat bagi gerakan nasional berikutnya, yang pada akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia menuju proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.



## B. Ideologi dan Tujuan Perjuangan PNI

---

Partai Nasional Indonesia (PNI) berpegang teguh pada ideologi nasionalisme Indonesia, yaitu paham yang menempatkan kepentingan bangsa dan tanah air di atas kepentingan individu maupun golongan. Nasionalisme ini bukanlah hasil tiruan dari Barat, tetapi lahir dari kesadaran kolektif rakyat Indonesia akan nasibnya sebagai bangsa yang terjajah. Bagi PNI, nasionalisme adalah semangat untuk membangun persatuan dan menegaskan kedaulatan bangsa berdasarkan kekuatan sendiri (self-determination). Ideologi ini tumbuh dari keyakinan bahwa bangsa Indonesia memiliki identitas, budaya, dan Sejarah sendiri yang harus dihormati dan dibangkitkan kembali sebagai dasar perjuangan menuju kemerdekaan (Utomo & Supriyono, 2021).



Gambar 23. Lambang Partai Nasional Indonesia (PNI)  
Sumber: Wikimedia Commons

Menurut pemikiran Ir. Soekarno, nasionalisme yang diperjuangkan PNI bukan nasionalisme sempit yang memisahkan Indonesia dari dunia luar, melainkan nasionalisme yang membebaskan (Radjab, n.d.). Nasionalisme yang dimaksud adalah kekuatan moral dan spiritual untuk menghapus penindasan, mengangkat martabat manusia Indonesia, dan menumbuhkan rasa percaya diri sebagai bangsa yang setara dengan bangsa lain di dunia. Dalam berbagai pidato dan tulisannya, Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme sejati tidak bertentangan dengan internasionalisme, karena hanya bangsa yang merdeka yang dapat berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Tujuan utama PNI adalah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana tercermin dalam sembojannya: **"Indonesia Merdeka atas Kekuatan Sendiri"** Semboyan ini menggambarkan tekad bahwa kemerdekaan tidak akan datang sebagai hadiah dari Belanda, tetapi harus diperjuangkan melalui kekuatan rakyat Indonesia sendiri. Bagi PNI, kemandirian merupakan prinsip dasar perjuangan. Bangsa Indonesia harus



menolak ketergantungan terhadap kekuasaan kolonial dan mengandalkan potensi rakyat sebagai sumber kekuatan utama.

Dalam mencapai tujuannya, PNI memilih strategi non-kooperatif, yaitu menolak segala bentuk kerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan ini dilandasi keyakinan bahwa kerja sama hanya akan memperkuat sistem penjajahan dan melemahkan semangat perlawanan bangsa. Soekarno berpendapat bahwa rakyat Indonesia tidak akan pernah memperoleh kemerdekaan sejati selama mereka masih bergantung pada belas kasihan penjajah. Oleh sebab itu, PNI lebih menekankan perjuangan melalui jalan politik dan pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kebangsaan di kalangan rakyat.

PNI berjuang melalui empat cara utama. Pertama, pendidikan politik rakyat, yakni mengajarkan masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap nasib bangsa. Kedua, organisasi dan mobilisasi massa, yaitu mengajak rakyat bergabung dalam kegiatan politik dan sosial untuk memperkuat solidaritas nasional. Ketiga, penyebaran ide nasionalisme melalui media cetak, rapat umum, dan pidato-pidato untuk menyebarkan semangat kebangsaan ke seluruh lapisan masyarakat. Keempat, pembangunan karakter nasional, dengan menumbuhkan kepercayaan diri dan kemandirian agar bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada pihak asing.

Selain itu, ideologi PNI juga dipengaruhi oleh konsep Marhaenisme yang diperkenalkan oleh Soekarno. Marhaenisme berakar pada kehidupan rakyat kecil Indonesia, terutama kaum tani dan buruh, yang menjadi tulang punggung bangsa. Menurut Soekarno, perjuangan kemerdekaan harus berpihak kepada rakyat kecil dan bertujuan untuk menghapus sistem eksploitasi manusia atas manusia. Dengan demikian, nasionalisme yang diperjuangkan PNI bukan hanya perjuangan politik untuk merebut kekuasaan, tetapi juga perjuangan sosial untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Melalui ideologi dan tujuan perjuangannya, PNI berhasil memadukan semangat nasionalisme, sosialisme, dan kemandirian ke dalam satu gerakan politik yang kuat dan terorganisir. PNI menegaskan bahwa kemerdekaan sejati hanya akan terwujud apabila rakyat memiliki kesadaran politik yang tinggi dan bersatu dalam perjuangan bersama. Dengan pandangan ini, PNI tidak hanya menjadi partai politik, tetapi juga sekolah politik rakyat yang mencetak kader-kader pejuang dan pemimpin bangsa (Islam et al., 2025). Ideologi inilah yang kemudian menjadi salah satu fondasi penting bagi lahirnya Pancasila dan konsep negara Indonesia merdeka di kemudian hari.



## C. Peran PNI dalam Pergerakan Nasional Indonesia

---

Partai Nasional Indonesia (PNI) memainkan peranan yang sangat penting dalam mengubah arah perjuangan bangsa Indonesia dari perlawanan bersifat lokal menjadi gerakan nasional yang terorganisir dan berlandaskan ideologi politik. Melalui pendekatan yang modern dan sistematis, PNI menjadi pelopor dalam membentuk kesadaran nasional rakyat Indonesia serta melahirkan banyak tokoh penting yang kelak berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan. Berikut beberapa peran penting PNI dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia (Saefullah et al., 2025).



Gambar 24. Aktivitas politik PNI dalam pergerakan nasional Indonesia  
Sumber: Wikimedia Commons / Arsip Nasional

### 1. Pelopor Gerakan Politik Modern

PNI menjadi organisasi yang memperkenalkan bentuk perjuangan politik yang lebih modern, terencana, dan berbasis organisasi. Sebelum berdirinya PNI, sebagian besar perjuangan rakyat Indonesia masih bersifat spontan dan daerah. PNI kemudian membawa pendekatan baru dengan menempatkan organisasi sebagai alat perjuangan politik. Melalui strategi ini, PNI berhasil mengubah perlawanan yang bersifat fisik menjadi perjuangan ideologis dan diplomatis yang lebih terarah menuju kemerdekaan nasional (Humairoh & Soepeno, 1945).

### 2. Pendidikan Politik Rakyat

Salah satu kontribusi besar PNI adalah keberhasilannya dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk rakyat. Melalui rapat umum, kursus politik, dan media massa seperti surat kabar Suluh Indonesia Muda, PNI menanamkan kesadaran akan pentingnya hak-hak politik dan tanggung jawab sebagai warga bangsa. PNI mengajarkan bahwa rakyat harus memahami arti kemerdekaan bukan hanya



sebagai kebebasan dari penjajah, tetapi juga sebagai kemampuan mengatur nasib sendiri. Upaya ini melahirkan generasi rakyat yang lebih sadar politik dan siap memperjuangkan kemerdekaan secara terorganisir (Pratama, 2020).

### **3. Pemicu Gerakan Nasional Lainnya**

Ketika para pemimpin PNI, termasuk Soekarno, ditangkap oleh pemerintah Belanda pada tahun 1929 dan diadili dalam kasus “Indonesia Menggugat,” semangat perjuangan justru semakin berkobar di kalangan rakyat. Penindasan terhadap PNI tidak memadamkan perjuangan, tetapi justru memicu lahirnya organisasi-organisasi baru seperti Partindo (Partai Indonesia) dan Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia). Kedua organisasi ini meneruskan semangat dan ideologi PNI dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Dengan demikian, PNI berperan sebagai sumber inspirasi dan penggerak bagi kelanjutan perjuangan nasional.

### **4. Pemersatu Kaum Terpelajar dan Rakyat**

PNI juga memiliki peran penting dalam menyatukan dua kelompok besar masyarakat Indonesia: kaum intelektual dan rakyat kecil. Sebelum PNI berdiri, perjuangan sering terpecah antara gerakan kaum terpelajar yang berorientasi pada pendidikan dan rakyat yang berjuang secara spontan. PNI menjembatani perbedaan tersebut dengan menanamkan ide kesetaraan dan perjuangan bersama. Melalui pendekatan ini, PNI berhasil memperkuat semangat persatuan dan membentuk basis massa yang lebih luas dalam perjuangan kemerdekaan.

### **5. Membentuk Kader Pemimpin Nasional**

PNI bukan hanya wadah politik, tetapi juga tempat pembentukan kader pemimpin bangsa. Melalui kegiatan organisasi, diskusi, dan pendidikan politik, banyak tokoh nasional lahir dari rahim PNI, seperti Soekarno, Sartono, Iskaq Tjokroadisurjo, dan Sunarjo Kolopaking. Mereka tidak hanya menjadi pemimpin PNI, tetapi juga memainkan peran besar dalam perjuangan menuju Proklamasi Kemerdekaan 1945 dan dalam pemerintahan Indonesia setelah merdeka. PNI dengan demikian berfungsi sebagai sekolah politik yang mencetak generasi penerus bangsa yang berjiwa nasionalis dan berkomitmen terhadap cita-cita kemerdekaan.

Secara keseluruhan, PNI berperan sebagai motor utama pergerakan nasional Indonesia yang berhasil menumbuhkan kesadaran politik rakyat, memperluas

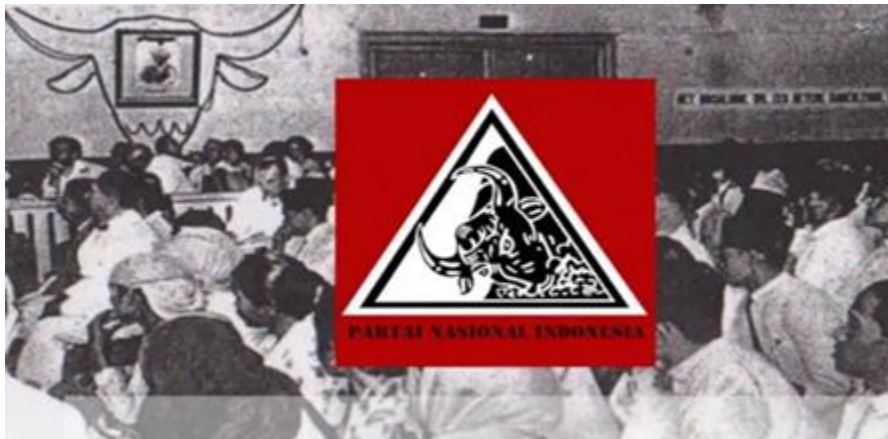


jaringan perjuangan, dan memperkuat semangat persatuan bangsa. Melalui pendekatan politik modern dan ideologi nasionalisme yang kuat, PNI tidak hanya menginspirasi gerakan-gerakan setelahnya, tetapi juga meletakkan dasar penting bagi lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

## **D. Dampak PNI terhadap Perjuangan Kemerdekaan**

---

Partai Nasional Indonesia (PNI) memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Melalui ideologi, strategi politik, dan kegiatan organisasinya, PNI berhasil mengubah pola perjuangan rakyat Indonesia dari bentuk kedaerahan menjadi gerakan nasional yang berlandaskan kesadaran politik. Dampak-dampak berikut menunjukkan pengaruh nyata PNI terhadap arah perjuangan bangsa Indonesia di masa penjajahan hingga menjelang kemerdekaan (Nasional & Pni, 2025).



Gambar 25. Pengaruh PNI terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia  
Sumber: Wikimedia Commons

### **1. Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme**

PNI berperan penting dalam membangkitkan kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Melalui pidato-pidato, tulisan, serta pendidikan politik yang digagas oleh para pemimpinnya, terutama Ir. Soekarno, rakyat mulai memahami bahwa kemerdekaan adalah hak bangsa Indonesia, bukan hadiah dari penjajah. Semangat nasionalisme yang disebarkan PNI mampu menumbuhkan keyakinan bahwa Indonesia memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Dari sinilah muncul kesadaran bahwa persatuan dan semangat kebangsaan merupakan kunci untuk mencapai kemerdekaan sejati.



## **2. Mendorong Lahirnya Partai dan Organisasi Baru**

Gerakan PNI yang begitu kuat dan berani menentang penjajahan menginspirasi banyak tokoh dan kelompok untuk mendirikan organisasi baru yang memiliki semangat serupa. Setelah PNI dibubarkan sementara akibat penangkapan para pemimpinnya pada tahun 1929, lahirlah organisasi seperti Partindo (Partai Indonesia) dan Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) yang meneruskan cita-cita perjuangan PNI. Bahkan setelah Indonesia merdeka, semangat PNI masih terasa dalam berbagai partai nasionalis yang muncul. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh ideologi PNI tidak berhenti pada masanya, tetapi terus berlanjut dan berkembang dalam perjalanan politik bangsa.

## **3. Menjadi Dasar Ideologi Perjuangan Politik Indonesia**

Prinsip-prinsip perjuangan yang diperjuangkan PNI, seperti nasionalisme, kemandirian, dan non-kooperatif terhadap penjajah, menjadi dasar bagi perjuangan politik bangsa Indonesia. Ideologi tersebut kemudian banyak diadopsi oleh organisasi-organisasi lain yang sejalan dengan cita-cita kemerdekaan. Nilai-nilai nasionalisme PNI juga turut memengaruhi pemikiran politik bangsa setelah Indonesia merdeka, terutama dalam pembentukan dasar negara dan arah kebijakan nasional. Dengan demikian, PNI berkontribusi besar dalam membentuk karakter ideologis bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kedaulatan dan persatuan nasional.

## **4. Memberi Pengaruh terhadap Pidato dan Gagasan Soekarno**

Gagasan dan pengalaman politik Soekarno selama memimpin PNI menjadi landasan penting bagi pemikiran-pemikiran besarnya di masa berikutnya. Dalam persidangan “Indonesia Menggugat” (1930), Soekarno menegaskan pentingnya persatuan nasional dan perlawanan terhadap imperialisme gagasan yang bersumber langsung dari perjuangan PNI. Pemikiran tersebut kemudian berkembang menjadi Marhaenisme, sebuah konsep perjuangan rakyat kecil yang menjadi inti ideologi PNI. Ide-ide itu pada akhirnya berpengaruh besar terhadap perumusan dasar negara Pancasila dan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) yang menjadi strategi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan.



## **5. Menginspirasi Gerakan Persatuan Nasional**

PNI juga memberikan dampak besar dalam memperkuat gerakan persatuan nasional Indonesia. Melalui kegiatan politik dan organisasinya, PNI menanamkan kesadaran bahwa perbedaan suku, agama, dan golongan tidak boleh menjadi penghalang dalam perjuangan kemerdekaan. Gagasan tentang persatuan ini menjadi landasan terbentuknya Sumpah Pemuda (1928) yang menegaskan tekad satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Dengan demikian, semangat persatuan yang disebarkan PNI tidak hanya mempersatukan rakyat pada masa kolonial, tetapi juga menjadi warisan penting dalam menjaga keutuhan bangsa setelah merdeka (Sebelas & Surakarta, 2021).

Secara keseluruhan, pengaruh PNI terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah lahirnya kesadaran nasional dan semangat persatuan bangsa. PNI bukan hanya organisasi politik, melainkan juga gerakan ideologis yang menanamkan nilai-nilai kemandirian, keadilan, dan kebangsaan. Dampak-dampak tersebut menjadikan PNI sebagai salah satu kekuatan utama yang membentuk arah perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan penuh pada tahun 1945.



## **E. Rangkuman**

---

Partai Nasional Indonesia (PNI) lahir dari semangat kebangkitan nasional dan ketidakpuasan terhadap kebijakan kolonial Belanda yang tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Berdirinya PNI pada 4 Juli 1927 di Bandung menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Latar belakang sosial politik saat itu seperti kegagalan Politik Etis, kesenjangan sosial, dan kesadaran kaum terpelajar terhadap ketidakadilan kolonial mendorong munculnya tekad untuk memperjuangkan kemerdekaan secara total. Oleh karena itu, PNI menjadi wadah bagi generasi muda Indonesia yang ingin mengubah perjuangan dari lokal dan sektoral menuju gerakan nasional yang lebih terorganisir.

Secara ideologis, PNI berpegang teguh pada nasionalisme Indonesia yang menekankan hak bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Ideologi ini berpijak pada keyakinan bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai atas kekuatan bangsa sendiri, sebagaimana sembojannya “Indonesia Merdeka atas Kekuatan Sendiri.” Tujuan utama PNI adalah mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Dalam perjalanan pergerakan nasional, PNI memainkan peran besar sebagai pelopor perjuangan politik modern di Indonesia. Meski menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial, semangat perjuangan PNI terus hidup dan memicu lahirnya organisasi-organisasi baru seperti Partindo dan Gerindo. PNI juga berperan sebagai jembatan antara kaum intelektual dan rakyat, serta mencetak banyak tokoh nasional yang kelak memimpin perjuangan menuju kemerdekaan.

Dampak perjuangan PNI sangat besar terhadap perjalanan bangsa Indonesia. PNI berhasil menumbuhkan kesadaran nasionalisme, memperkuat semangat persatuan, serta membentuk dasar ideologi politik yang memengaruhi arah perjuangan nasional. Pemikiran dan gagasan Soekarno yang berakar dari PNI turut menjadi fondasi bagi lahirnya Pancasila dan ideologi kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, PNI bukan hanya organisasi politik semata, melainkan juga motor ideologis yang membangkitkan kesadaran nasional dan memperkuat tekad bangsa menuju kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

# BAB 6

## INDISCHE VEREENIGING DAN TUMBUHNYA KESADARAN NASIONALISME INDONESIA (1908–1925)

*Marnastiar Munsyid, Fahlan Munfaridz*

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan merupakan proses panjang yang tidak hanya melibatkan perlawanan fisik terhadap kolonialisme, tetapi juga perjuangan intelektual yang menumbuhkan kesadaran akan jati diri dan kebangsaan. Kesadaran nasionalisme tidak lahir secara spontan, melainkan melalui pembentukan pola pikir kritis dan semangat persatuan yang berkembang di berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan kaum terpelajar. Dalam konteks ini, *Indische Vereeniging* memainkan peran fundamental sebagai pelopor pergerakan intelektual yang menumbuhkan kesadaran nasional di kalangan mahasiswa Hindia Belanda yang menempuh pendidikan di Eropa.

Berdirinya *Indische Vereeniging* pada tahun 1908 di Belanda berawal dari semangat solidaritas di antara pelajar Hindia Belanda yang merasakan diskriminasi sosial dan politik di negeri kolonial. Awalnya organisasi ini bersifat sosial dan kultural, bertujuan memepererat tali persaudaraan di perantauan. Namun, seiring berkembangnya kesadaran politik dan nasionalisme di kalangan anggotanya, organisasi ini berubah menjadi wadah perjuangan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penindasan kolonial (Yansyah et al., 2022). Menurut Yansyah, *Indische Vereeniging* menjadi “pusat pertemuan intelektual yang menyuarakan gagasan kesetaraan, kemerdekaan, dan persatuan nasional,” sehingga menjadi fondasi bagi munculnya gerakan nasional modern.

Transformasi ideologis organisasi ini semakin menguat ketika Tiga Serangkai—Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara (Suwardi Suryaningrat), dan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo—yang sebelumnya terlibat dalam *Indische Partij*, dibuang ke Belanda oleh pemerintah kolonial pada tahun 1913. Kehadiran mereka memberikan warna baru dalam perjuangan mahasiswa di Eropa. Mereka memperkenalkan gagasan nasionalisme radikal yang menentang dominasi kolonial, serta memperluas peran *Indische Vereeniging* dari sekadar perkumpulan sosial menjadi gerakan politik yang sadar akan misi kemerdekaan (Fahmi et al., 2025). Menurut (Fahmi et al., 2025) organisasi ini berperan “membangun hegemoni tandingan terhadap ideologi kolonial melalui jalur pendidikan dan media massa,” sehingga perjuangan mereka bersifat intelektual sekaligus ideologis.

Salah satu bentuk nyata perjuangan intelektual tersebut adalah melalui penerbitan media. Organisasi ini menerbitkan surat kabar seperti *De Express* dan *Indonesia*



Merdeka, yang menjadi wadah untuk menyebarkan gagasan kebangsaan, menolak diskriminasi rasial, dan menyerukan kemerdekaan Indonesia. Media digunakan sebagai alat propaganda intelektual untuk membangkitkan kesadaran politik masyarakat. (Fahmi et al., 2025) menegaskan bahwa “media menjadi senjata utama dalam menyebarkan ide nasionalisme dan membentuk opini publik melawan hegemoni kolonial.” Melalui tulisan-tulisan yang kritis dan progresif, para tokoh Indische Vereeniging berhasil menanamkan pandangan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa, bukan hadiah dari kolonialisme.

Selain peran media, strategi pendidikan juga menjadi faktor penting dalam perjuangan Indische Vereeniging. Para tokoh organisasi ini memahami bahwa pendidikan merupakan jalan menuju pembebasan bangsa dari ketertinggalan dan ketergantungan. (Fahmi et al., 2025) menyatakan bahwa “pendidikan menjadi sarana untuk membentuk karakter nasional yang berlandaskan nilai keadilan dan kesetaraan.” Pemikiran ini kemudian sejalan dengan gagasan Ki Hajar Dewantara yang menganggap pendidikan sebagai alat perjuangan untuk mencerdaskan rakyat dan membangun kesadaran nasional.

Pada tahun 1922, Indische Vereeniging mengganti namanya menjadi Indonesische Vereeniging, dan tiga tahun kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia (Tia Rusdiana, 2022). Pergantian nama ini memiliki makna simbolis yang sangat penting: ia menandai kesadaran bahwa perjuangan mereka bukan lagi sekadar mewakili kepentingan “penduduk Hindia Belanda,” tetapi perjuangan seluruh bangsa Indonesia. (Tia Rusdiana, 2022). menjelaskan bahwa perubahan nama ini “menunjukkan gejala penolakan terhadap kolonialisme dan pengakuan terhadap identitas nasional Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dan berdaulat.”

Selain itu, organisasi ini juga aktif dalam diplomasi internasional. Tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, dan Iwa Kusumasumantri membawa isu Indonesia ke forum-forum global. Mereka memperkenalkan Indonesia sebagai entitas politik yang layak mendapat pengakuan di dunia internasional. Menurut (Tia Rusdiana, 2022), “peran Perhimpunan Indonesia di luar negeri menjadi jembatan yang menghubungkan perjuangan nasional dengan opini publik internasional,” terutama dengan organisasi anti-imperialis di Eropa. Strategi ini memperluas cakupan perjuangan dari lokal menjadi global, menjadikan perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya sebagai isu nasional, tetapi juga bagian dari perjuangan universal melawan kolonialisme.

Perjuangan Indische Vereeniging tidak dapat dilepaskan dari semangat persatuan dan cita-cita kemerdekaan yang mulai tumbuh di tanah air melalui organisasi seperti Budi Utomo (1908) dan Sarekat Islam (1911). Namun, perbedaan utama terletak pada sifat perjuangan Indische Vereeniging yang lebih intelektual dan



universal. Mereka tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan politik, tetapi juga berupaya “membebaskan cara berpikir masyarakat dari belenggu kolonialisme” (Fahmi et al., 2025). Dengan demikian, *Indische Vereeniging* berperan dalam membangun fondasi ideologis dan kultural bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Kontribusi organisasi ini juga dapat dilihat dari keberhasilannya menanamkan nilai-nilai nasionalisme, solidaritas, dan kesadaran politik di kalangan mahasiswa dan cendekiawan muda Indonesia. (Yansyah et al., 2022) menyatakan bahwa *Indische Vereeniging* berhasil “membentuk generasi pemikir yang tidak hanya memahami persoalan kolonialisme, tetapi juga mampu menawarkan alternatif berupa kemandirian bangsa.” Melalui perjuangan ini, *Indische Vereeniging* menjadi wadah yang mengubah orientasi kaum terpelajar dari kesetiaan kepada pemerintah kolonial menjadi kesetiaan terhadap bangsa sendiri.

Dengan demikian, *Indische Vereeniging* memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran nasionalisme Indonesia. Organisasi ini menjadi pelopor gerakan intelektual yang melahirkan pandangan baru tentang kebebasan, persamaan, dan kemerdekaan. Melalui media, pendidikan, dan diplomasi internasional, mereka tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan secara ideologis, tetapi juga memperkenalkan nama “Indonesia” ke kancah dunia. Seperti ditegaskan oleh (Rusdiana et al., 2022), perjuangan mereka “melahirkan generasi nasionalis yang berpengetahuan luas dan memiliki pandangan global tentang kemerdekaan bangsanya.”

Oleh karena itu, kajian tentang peran *Indische Vereeniging* dalam membentuk kesadaran nasionalisme Indonesia menjadi penting, karena organisasi ini merupakan salah satu pilar awal pembentukan nasionalisme modern. Ia menjadi contoh bagaimana perjuangan intelektual, komunikasi politik, dan solidaritas mahasiswa dapat menjadi kekuatan ideologis dalam melawan kolonialisme dan membangun identitas kebangsaan yang utuh. Tulisan ini akan mengkaji tentang : (1) Bagaimana latar belakang berdirinya *Indische Vereeniging* dan perkembangan organisasi tersebut hingga menjadi wadah perjuangan intelektual bagi mahasiswa Hindia Belanda di luar negeri? (2) Bagaimana peran *Indische Vereeniging* dalam membentuk dan menumbuhkan kesadaran nasionalisme Indonesia? (3) Apa dampak keberadaan dan aktivitas *Indische Vereeniging* terhadap perkembangan gerakan nasional dan kesadaran politik bangsa Indonesia di dalam negeri?



## A. Indische Vereeniging

---

Lahirnya Indische Vereeniging pada tahun 1908 tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan politik pada awal abad ke-20, ketika kebijakan Politik Etis pemerintah kolonial Belanda membuka kesempatan bagi kaum pribumi untuk mengenyam pendidikan modern. Meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat dominasi kolonial, justru darinyalah lahir generasi muda terpelajar yang kritis terhadap ketidakadilan penjajahan. Para mahasiswa Hindia Belanda yang berkesempatan menempuh pendidikan di Belanda mulai menyadari bahwa bangsa mereka hidup dalam sistem yang menindas dan tidak memiliki hak politik yang setara. Dari kesadaran inilah muncul dorongan untuk membentuk wadah bersama yang kelak dikenal sebagai Indische Vereeniging (Yansyah et al., 2022).

Pada awalnya, Indische Vereeniging didirikan oleh sekelompok mahasiswa Hindia Belanda seperti Sutan Casayangan Soripada, Soemitro Kolopaking, dan Sosrokartono. Tujuan utama organisasi ini pada fase awal adalah menjalin kebersamaan dan membantu para pelajar baru dalam beradaptasi dengan lingkungan akademik di Belanda. Namun, dalam perkembangannya, organisasi ini tidak berhenti sebagai perkumpulan sosial, melainkan menjadi wadah pertukaran gagasan dan refleksi kritis terhadap realitas kolonial di tanah air. (Yansyah et al., 2022) menjelaskan bahwa Indische Vereeniging kemudian menjadi tempat berkumpulnya para intelektual muda untuk membahas ketimpangan politik, sosial, dan ekonomi yang dialami rakyat Indonesia di bawah kekuasaan kolonial.

Kesadaran politik dan nasionalisme di kalangan anggota Indische Vereeniging semakin meningkat seiring dengan arus global ide-ide liberalisme, sosialisme, dan demokrasi yang berkembang di Eropa pada masa itu. Para mahasiswa Hindia Belanda yang hidup di tengah atmosfer kebebasan berpikir di Eropa mulai mempertanyakan legitimasi kolonialisme yang menindas bangsanya sendiri. Menurut (Nurhidayat Ismail et al., 2025), *Indische Vereeniging* kemudian berkembang menjadi “wadah pembentukan kesadaran nasional yang didorong oleh semangat keilmuan dan nilai-nilai kemanusiaan universal.” Hal ini menunjukkan bahwa semangat perjuangan yang lahir di lingkungan mahasiswa Indonesia di Belanda memiliki dimensi intelektual yang kuat dan berakar pada kesadaran moral terhadap keadilan dan kemerdekaan.

Transformasi penting dalam perjalanan Indische Vereeniging terjadi ketika tiga tokoh nasionalis radikal, Ernest Douwes Dekker, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Ki Hajar Dewantara (Suwardi Suryaningrat) yang dikenal sebagai Tiga Serangkai, diasingkan ke Belanda oleh pemerintah kolonial pada tahun 1913. Mereka membawa semangat perlawanan terhadap kolonialisme dan memperkenalkan





seminar, dan kegiatan penulisan menjadi wahana untuk memperdalam pengetahuan mengenai sistem pemerintahan, ekonomi, dan pergerakan kemerdekaan di berbagai negara. (Rusdiana et al., 2022) menilai bahwa Indische Vereeniging berfungsi sebagai “sekolah politik” yang melahirkan generasi pemimpin bangsa berwawasan luas dan berjiwa nasionalis. Para tokoh seperti Mohammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, dan Iwa Kusumasumantri yang kelak menjadi pemimpin nasional, banyak belajar dan berproses di lingkungan organisasi ini.

(Nurhidayat Ismail et al., 2025) menambahkan bahwa perkembangan organisasi ini mencapai puncaknya ketika pada tahun 1922 berganti nama menjadi Indonesische Vereeniging, dan kemudian pada tahun 1925 resmi menjadi Perhimpunan Indonesia. Pergantian nama tersebut mencerminkan pergeseran ideologi yang lebih jelas dan tegas terhadap cita-cita kemerdekaan penuh. Perubahan ini menandai lahirnya kesadaran baru bahwa perjuangan mereka tidak lagi sekadar mewakili “pelajar Hindia Belanda”, melainkan perjuangan seluruh bangsa Indonesia. (Nurhidayat Ismail et al., 2025). menegaskan bahwa perubahan nama ini “merupakan deklarasi ideologis yang menolak segala bentuk kompromi dengan kolonialisme dan menegaskan identitas Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.”



Gambar 27. id.Wikipedia.org Pertemuan Perhimpunan Indonesia, diperkirakan di Leiden, ca 1924–1927

Melalui proses panjang tersebut, Indische Vereeniging berhasil mengubah wajah gerakan mahasiswa dari sekadar kelompok intelektual menjadi motor penggerak nasionalisme modern. Mereka tidak hanya menanamkan semangat kemerdekaan di kalangan pelajar di luar negeri, tetapi juga berkontribusi dalam menyebarkan ide nasionalisme ke tanah air melalui jaringan komunikasi dan tulisan-tulisan mereka. Menurut (Yansyah et al., 2022), organisasi ini menjadi “pionir dalam menjembatani perjuangan intelektual di luar negeri dengan perjuangan politik di dalam negeri,



sehingga menciptakan kesinambungan gerakan nasional.”Secara keseluruhan, Indische Vereeniging menjadi simbol awal dari pergerakan nasional yang berbasis pemikiran, kesadaran, dan pendidikan. Organisasi ini membuktikan bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga melalui pena, wacana, dan pendidikan yang mencerdaskan. Seperti yang ditegaskan (Fahmi et al., 2025), perjuangan intelektual yang dilakukan Indische Vereeniging “bertujuan untuk membebaskan cara berpikir masyarakat dari belenggu kolonial dan membentuk manusia Indonesia yang sadar akan hak dan martabatnya sebagai bangsa.”

## **B. Peran *Indische Vereeniging* Dalam Membentuk Kesadaran Nasionalisme Indonesia**

---

Peran Indische Vereeniging dalam membentuk kesadaran nasionalisme Indonesia merupakan salah satu aspek paling penting dalam sejarah awal pergerakan kebangsaan. Organisasi ini menjadi wadah bagi mahasiswa Hindia Belanda di Eropa untuk mengembangkan gagasan mengenai kebangsaan, kemerdekaan, dan persatuan Indonesia. Dari perkumpulan sosial, Indische Vereeniging kemudian berkembang menjadi organisasi yang berorientasi politik dan berperan besar dalam menanamkan semangat nasionalisme modern di kalangan pelajar dan intelektual muda Indonesia.

Pada masa awal berdirinya, kegiatan organisasi ini masih bersifat sosial dan kultural. Namun seiring meningkatnya kesadaran politik di kalangan mahasiswa, orientasi perjuangan Indische Vereeniging berubah menjadi perjuangan intelektual yang berlandaskan kesadaran kebangsaan. Menurut (Yansyah et al., 2022), organisasi ini menjadi wadah penting bagi mahasiswa Indonesia untuk mengkritik ketimpangan kolonial dan memperjuangkan hak bangsanya atas kemerdekaan. Dalam forum-forum diskusi dan pertemuan rutin, para anggota mendalami persoalan politik, ekonomi, dan sosial di Hindia Belanda serta mencari cara untuk mengatasinya melalui jalur pemikiran dan pendidikan.

Salah satu kontribusi penting Indische Vereeniging adalah perannya dalam pembentukan kesadaran nasional melalui media dan pendidikan. Organisasi ini menerbitkan majalah Hindia Poetra, yang kemudian berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Melalui media tersebut, para mahasiswa menyebarkan ide-ide kebangsaan dan mengkritik sistem kolonial yang menindas rakyat Indonesia. Menurut (Fahmi et al., 2025), media menjadi alat perjuangan intelektual yang efektif dalam menanamkan nilai kebebasan dan kesetaraan, karena melalui tulisan



dan diskusi yang disebarluaskan, masyarakat dapat memahami arti kemerdekaan dan harga diri sebagai bangsa.

Selain melalui media, *Indische Vereeniging* juga memainkan peran penting dalam pembinaan pendidikan politik dan karakter nasionalis. Diskusi dan seminar yang diadakan secara rutin di Belanda menjadi sarana bagi para mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam pengetahuan tentang perjuangan bangsa-bangsa lain yang menentang kolonialisme. Dari kegiatan ini lahir tokoh-tokoh nasionalis seperti Mohammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, dan Iwa Kusumasumantri, yang kelak menjadi pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia. (Rusdiana et al., 2022) menjelaskan bahwa *Indische Vereeniging* berfungsi sebagai “sekolah politik” yang membentuk pola pikir kritis, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan tanggung jawab moral terhadap perjuangan bangsa.

Perubahan nama *Indische Vereeniging* menjadi Perhimpunan Indonesia (PI) pada tahun 1925 menandai fase penting dalam pembentukan kesadaran nasionalisme Indonesia. Perubahan nama ini bukan hanya formalitas, melainkan simbol lahirnya identitas politik yang lebih tegas. (Nurhidayat Ismail et al., 2025) menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk pernyataan politik bahwa perjuangan mahasiswa Indonesia di Belanda bukan lagi sekadar upaya akademik, melainkan bagian dari gerakan kebangsaan yang memperjuangkan kemerdekaan penuh dari penjajahan. Perubahan ini mempertegas posisi organisasi sebagai pelopor pergerakan nasional di luar negeri.

Lebih jauh lagi, *Indische Vereeniging* juga berperan dalam memperkenalkan nama “Indonesia” di dunia internasional. Melalui aktivitas diplomasi dan partisipasi dalam forum-forum global, organisasi ini berhasil membawa isu kemerdekaan Indonesia ke tingkat internasional. (Putri, 2023) menjelaskan bahwa para tokoh Perhimpunan Indonesia seperti Mohammad Hatta aktif memperkenalkan identitas Indonesia dalam konferensi internasional dan jaringan mahasiswa dunia. Hal ini memperkuat pengakuan global terhadap eksistensi bangsa Indonesia sebagai entitas politik yang mandiri, sekaligus memperkuat semangat nasionalisme di kalangan pelajar di tanah air. Selain memperjuangkan kemerdekaan melalui diplomasi, *Indische Vereeniging* juga memainkan peran penting dalam membangun semangat persatuan nasional. Di tengah kebijakan kolonial yang memecah belah masyarakat berdasarkan etnis dan status sosial, organisasi ini justru menegaskan pentingnya persatuan sebagai dasar perjuangan. Dalam pandangan (Yansyah et al., 2022), *Indische Vereeniging* menjadi wadah pemersatu bagi para mahasiswa dari berbagai daerah di Nusantara untuk saling mengenal dan menumbuhkan kesadaran bahwa mereka berasal dari satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nilai persatuan inilah yang kemudian berkembang menjadi landasan ideologis gerakan nasional hingga Sumpah Pemuda 1928.



Dengan demikian, peran *Indische Vereeniging* dalam membentuk kesadaran nasionalisme Indonesia meliputi beberapa dimensi penting: pertama, sebagai pusat pendidikan politik dan intelektual yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan; kedua, sebagai alat propaganda intelektual melalui media yang membentuk opini publik tentang pentingnya kemerdekaan; ketiga, sebagai jembatan diplomasi internasional yang memperkenalkan identitas Indonesia di dunia; dan keempat, sebagai wadah persatuan bangsa yang menumbuhkan kesadaran kolektif tentang keindonesiaan. Seperti ditegaskan oleh (Fahmi et al., 2025), perjuangan *Indische Vereeniging* bukan sekadar melawan penjajahan secara fisik, tetapi lebih mendasar—yaitu membebaskan pikiran bangsa dari dominasi ideologi kolonial dan menanamkan keyakinan bahwa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri. Melalui peran-peran tersebut, *Indische Vereeniging* dapat dikatakan sebagai cikal bakal terbentuknya kesadaran nasional modern yang rasional, inklusif, dan berorientasi pada kemerdekaan sejati.

### **C. Dampak Keberadaan *Indische Vereeniging* Terhadap Pergerakan Nasional**

---

Keberadaan *Indische Vereeniging* memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan gerakan nasional dan pembentukan kesadaran politik bangsa Indonesia. Organisasi ini bukan hanya menjadi tempat berhimpun bagi para mahasiswa Hindia Belanda di luar negeri, tetapi juga menjadi pusat lahirnya ide-ide kebangsaan yang memengaruhi arah pergerakan nasional di tanah air. Melalui aktivitasnya di bidang pendidikan, media, dan diplomasi internasional, *Indische Vereeniging* turut membentuk pola pikir baru yang kritis, rasional, dan berorientasi pada kemerdekaan bangsa.

Menurut (Yansyah et al., 2022), *Indische Vereeniging* merupakan pelopor dalam menanamkan semangat nasionalisme modern yang bersifat intelektual dan ideologis. Gagasan yang berkembang di lingkungan organisasi ini menyebar ke tanah air melalui media dan komunikasi antar- mahasiswa, sehingga memberikan pengaruh besar terhadap munculnya organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Dengan demikian, *Indische Vereeniging* berperan sebagai penggerak awal yang menginspirasi munculnya berbagai bentuk perjuangan rakyat di dalam negeri.

Dampak paling nyata dari aktivitas *Indische Vereeniging* dapat dilihat pada terbentuknya kesadaran politik generasi muda Indonesia. Para anggota organisasi ini memelopori gagasan bahwa kemerdekaan bukan sekadar cita-cita moral, melainkan hak politik yang harus diperjuangkan secara sistematis dan ilmiah.



Melalui tulisan-tulisan di *Hindia Poetra* dan *Indonesia Merdeka*, mereka memperkenalkan konsep-konsep seperti *self-determination*, *non-kooperasi*, dan *self-help*—nilai-nilai yang kemudian menjadi landasan perjuangan organisasi di Indonesia. (Fahmi et al., 2025) menegaskan bahwa strategi propaganda intelektual *Indische Vereeniging* melalui media dan pendidikan “berhasil membentuk pola kesadaran baru yang menempatkan rakyat sebagai subjek sejarah, bukan objek penjajahan.

Selain menanamkan kesadaran politik, dampak penting lainnya adalah munculnya generasi pemimpin nasional yang berjiwa kritis dan kosmopolit. Melalui kegiatan akademik dan diskusi di Belanda, para mahasiswa memperoleh wawasan global tentang perjuangan anti-kolonial di Asia dan Afrika. Tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, dan Iwa Kusumasumantri merupakan hasil dari proses pendidikan politik yang dijalankan oleh organisasi ini. (Rusdiana et al., 2022) menyebut bahwa pengalaman intelektual di *Indische Vereeniging* “membentuk karakter kepemimpinan yang rasional, berwawasan internasional, dan berorientasi pada kemerdekaan penuh tanpa kompromi terhadap kolonialisme.”

Lebih jauh, aktivitas *Indische Vereeniging* juga berdampak pada penyebaran ide persatuan nasional di kalangan pelajar dan pemuda di tanah air. Melalui jaringan komunikasi dengan organisasi di Hindia Belanda, seperti *Jong Java*, *Jong Sumatra*, dan *Jong Ambon*, gagasan kebangsaan yang dikembangkan di Belanda turut mengilhami lahirnya semangat *Sumpah Pemuda* tahun 1928. (Nurhidayat Ismail et al., 2025) menilai bahwa gagasan persatuan yang dibawa oleh *Indische Vereeniging* menjadi “fondasi konseptual bagi tumbuhnya solidaritas nasional di kalangan pemuda Indonesia.” Hal ini membuktikan bahwa pengaruh organisasi tersebut tidak terbatas pada ruang geografis Eropa, melainkan menembus batas kolonial dan menumbuhkan kesadaran baru di tanah air.

Selain dalam ranah pemikiran, *Indische Vereeniging* juga memberikan dampak konkret terhadap strategi perjuangan politik nasional. Melalui *Perhimpunan Indonesia*, para anggotanya mengembangkan prinsip *non-kooperasi* terhadap pemerintah kolonial, yaitu menolak bekerja sama dengan Belanda dalam bentuk apa pun. Prinsip ini kemudian diadopsi oleh *Partai Nasional Indonesia (PNI)* yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. Dengan demikian, perjuangan intelektual di luar negeri bertransformasi menjadi gerakan politik yang konkret di tanah air.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah pengakuan internasional terhadap identitas Indonesia sebagai bangsa merdeka. Aktivitas diplomatik yang dilakukan oleh para anggota *Perhimpunan Indonesia* dalam forum-forum global berhasil memperkenalkan nama “Indonesia” sebagai entitas politik yang mandiri. (Putri,



2023) menegaskan bahwa keberhasilan ini menjadi langkah awal bagi diplomasi kemerdekaan Indonesia, jauh sebelum proklamasi tahun 1945. Perjuangan mereka di kancah internasional mengubah pandangan dunia terhadap Indonesia, sekaligus memperkuat legitimasi moral perjuangan kemerdekaan. Dari segi ideologis, Indische Vereeniging juga membawa dampak jangka panjang dalam membentuk identitas kebangsaan Indonesia. Kesadaran nasional yang dibangun oleh organisasi ini tidak bersifat sempit atau etnosentris, melainkan mencakup seluruh elemen bangsa. Mereka menolak pembagian masyarakat berdasarkan ras, agama, atau kelas sosial. Semangat inklusif ini kemudian menjadi nilai dasar bagi ideologi kebangsaan Indonesia yang menekankan persatuan dalam keberagaman. (Fahmi et al., 2025) menyebut bahwa “perjuangan intelektual Indische Vereeniging merupakan bentuk pembebasan mental dan ideologis dari struktur kolonial, yang melahirkan kesadaran kebangsaan modern.”

Dari seluruh uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak Indische Vereeniging terhadap gerakan nasional Indonesia bersifat multidimensional: 1. Intelektual, karena membentuk pola pikir nasional yang rasional dan kritis terhadap kolonialisme; 2. Politik, karena melahirkan pemimpin dan ideologi perjuangan yang menjadi dasar partai-partai nasional; 3. Sosial dan kultural, karena menumbuhkan semangat persatuan dan solidaritas antar-daerah; 4. Internasional, karena memperkenalkan nama Indonesia ke dunia dan memperkuat legitimasi perjuangan kemerdekaan.

Dengan demikian, Indische Vereeniging dapat dianggap sebagai jembatan sejarah antara fase kebangkitan intelektual dan perjuangan kemerdekaan bangsa. Ia bukan sekadar organisasi mahasiswa di perantauan, tetapi juga motor ideologis yang menyalakan kesadaran nasional, menginspirasi gerakan politik di tanah air, dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme yang menjadi dasar bagi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **D. Rangkuman**

---

Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya berlangsung melalui perlawanan fisik, tetapi juga melalui perjuangan intelektual yang menumbuhkan kesadaran nasionalisme. Dalam konteks ini, Indische Vereeniging memainkan peran strategis sebagai pelopor gerakan intelektual mahasiswa Hindia Belanda di Eropa yang berkontribusi besar terhadap lahirnya nasionalisme modern Indonesia. Indische Vereeniging didirikan pada tahun 1908 di Belanda, berawal sebagai organisasi sosial untuk mempererat solidaritas mahasiswa Hindia Belanda yang mengalami diskriminasi kolonial. Namun, seiring berkembangnya kesadaran politik dan



pengaruh pemikiran liberal, demokratis, dan anti-kolonial di Eropa, organisasi ini mengalami transformasi ideologis menjadi wadah perjuangan intelektual dan politik. Kehadiran Tiga Serangkai Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo menjadi katalis penting dalam mengarahkan organisasi ini pada cita-cita kemerdekaan penuh.

Peran Indische Vereeniging tampak jelas melalui penggunaan media dan pendidikan sebagai alat perjuangan. Penerbitan surat kabar Hindia Poetra dan Indonesia Merdeka menjadi sarana penyebaran gagasan nasionalisme, kritik terhadap kolonialisme, dan pembentukan opini publik yang menempatkan kemerdekaan sebagai hak bangsa. Selain itu, organisasi ini berfungsi sebagai “sekolah politik” yang membentuk karakter intelektual, kritis, dan nasionalis para anggotanya, termasuk tokoh-tokoh besar seperti Mohammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, dan Iwa Kusumasumantri. Perubahan nama menjadi *Indonesische Vereeniging* (1922) dan kemudian Perhimpunan Indonesia (1925) menandai penegasan identitas nasional Indonesia serta penolakan tegas terhadap kolonialisme. Melalui aktivitas diplomasi internasional, organisasi ini berhasil memperkenalkan nama “Indonesia” ke dunia global dan menghubungkan perjuangan nasional dengan gerakan anti-imperialisme internasional. Dampak keberadaan Indische Vereeniging bersifat multidimensional: membentuk kesadaran politik generasi muda, melahirkan pemimpin nasional berwawasan global, menginspirasi strategi non-kooperasi dalam perjuangan nasional, serta menanamkan nilai persatuan dan nasionalisme inklusif yang menjadi fondasi ideologis Indonesia modern. Dengan demikian, Indische Vereeniging tidak hanya berperan sebagai organisasi mahasiswa di perantauan, tetapi sebagai motor intelektual dan ideologis yang menjembatani kebangkitan pemikiran dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia.



# DAFTAR PUSTAKA

---

- Aditya, W. (2011). *Pengaruh polemik Djawi Hisworo terhadap kondisi Sarekat Islam tahun 1918-1920*.
- Afrianto, M. R., Umar, T., Hadi, S., & Ribawati, E. (2024). Musso ' s Role in the PKI Rebellion in Madiun in 1948. 12(2). <https://doi.org/10.24127/hj.v12i2.9681>
- Agustina Wilujeng Pramestuti, Yety Rochwulaningsih & Singgih Tri Sulistiyono. (2022). Strategi Politik PNI untuk Memenangkan Pemilu 1955 di Indonesia. *Indonesian Historical Studies*, 6(1). DOI:10.14710/ihis.v6i1.14043 (ejournal2.undip.ac.id)
- Agustina Wilujeng Pramestuti, Yety Rochwulaningsih & Singgih Tri Sulistiyono. (2022).
- Antonius Purwanto. (2021). *Politik Etis dan Lahirnya Golongan Terpelajar Pribumi*. Kompaspedia.
- Anugrah, D., Putra, G., Batia, L., Brandsteder, J. A., Dekker, H. W., & Tengah, J. (2022). E-issn: 2502-6674. 7(1), 57-72.
- Azizah, N. (2019). *Peran Peradaban Islam dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dunia*. *Jurnal Al-Tsaqafa*, 16(2), 145-156.
- Bahri, S. (2022). *PERAN HAJI SAMANHUDI DALAM SAREKAT DAGANG ISLAM (1905-1912 M)*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon S1 SPI.
- Bahrudin, M. Z. F. M. (2024). Pengaruh Organisasi Politik Islam Indonesia Terhadap Kesedaran Nasionalisme Melayu (1930-1959): *The Influence of Indonesia's Islamic Political Organization on the Awakening of Malay Nationalism (1930-1950)*. *International Journal of Interdisciplinary and Strategic Studies*, 5(8), 523-529.
- Batubara, N. I. (2022). POLITEIA : Jurnal Ilmu Politik Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Gerakan Pemberontakan Partai Komunis Indonesia ( PKI ) 1926-1927. 14(1), 1-16.
- CNN Indonesia. (2021). *Wahidin Sudirohusodo: Tokoh Perintis Pendidikan dan Kebangkitan Nasional*.
- Crouch, H. A. (2007). *The army and politics in Indonesia*. Equinox Publishing.

- Dalimunthe, S. Y., Asrul, A. A., Sustika, U., Fitriana, S., & Atikah, P. (2025). Pengaruh Pecahnya Sarekat Islam Pada Pergerakan Nasional Di Indonesia. *Formatif: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(01), 1–8.
- Fadilla, L., Hasanah, R., & Purnama, D. (2024). *Peran Intelektual Pribumi dalam Pergerakan Nasional Awal Abad ke-20*. *Jurnal Historika Nusantara*, 10(1), 55–68.
- Fahmi, R. F. M., Nurpadilah, S. L., Sudrajat, S. R., & Nur, R. S. (2025). Propaganda Intelektual Indische Partij: Strategi Media Dan Pendidikan Dalam Membangkitkan Kesadaran Nasional (1912-1925). *RONIK: Journal of History Education and Historiography*, 9(1), 1–17.
- Hidayat, A. (2021). *Dinamika Nasionalisme Awal Abad ke-20: Budi Utomo dan Pembentukan Identitas Kebangsaan*. *Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora*, 9(2), 54–69.
- Humairoh, I. D., & Soepeno, B. (1945). Soekarno ' s Consideration About The Unity Of Indonesia With Composing PNI as Staatspartij Years 1945. 4(2252), 157–171.
- Ichsan, M. F., Sutrisno, B., & Rahmawati, D. (2023). *Kebudayaan sebagai Basis Perlawanan Kultural dalam Pergerakan Nasional Indonesia*. *Jurnal Kebudayaan dan Nasionalisme*, 5(1), 33–47.
- Iftitah Dian Humairoh, Bambang Soepeno, Sugiyanto & Rully Putri Nirmala Puji. (2020). Pertimbangan Soekarno tentang Persatuan Indonesia dengan Membentuk PNI sebagai Staatspartij Tahun 1945. *Jurnal Historica*, 4(2). (historica.jurnal.unej.ac.id)
- Ilham Nur Utomo, Agustinus Supriyono & Indriyanto. (2021). Bahaja Menghantjam: Pasang Surut Gerakan PNI Baru 1931- 1942. *Indonesian Historical Studies*, 5(2). DOI:10.14710/ihis.v5i2.10716 (ejournal2.undip.ac.id)
- Irfan, M. Z. (n.d.). *Peran HOS Tjokroaminoto Dalam Mempertahankan Sarekat Islam (1916-1934)*.
- Islam, U., Sultan, N., & Hasanuddin, M. (2025). PNI dan Politik Inklusif : Membangun Gerakan Nasional Anti Kolonial di Indonesia ( 1928-1931 ). 1, 27–40.
- Ismail Triyanto, & Sukari. (2024). Kebangkitan Nasional Landasan Penting Dalam Pendidikan Islam di Indonesia. *Al-Abshor : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 117–128. <https://doi.org/10.71242/py1nq633>



- Ismail, A. S., & Sulisty, W. D. (2024). Pemberontakan VSTP di Semarang Tahun 1923 dan Potensi Pengembangan Bahan Pembelajaran Sejarahnya. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(1), 245–258.
- Jayusman, I., & Shavab, O. A. K. (2021). Peranan Sarekat Islam (Si) Dan Muhammadiyah Sebagai Gerakan Politik Dan Pendidikan Pada Masa Pergerakan Nasional. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 7(2), 82–92.
- Jurnal Intelek Insan Cendikia. (2025). SEJARAH LAHIRNYA BUDI UTOMO. Vol. 2 No. 5 (Mei 2025). (Diacu sebagai: Jurnal Intelek Insan Cendikia, 2025)
- Kahin, G. M. (2018). *Nationalism and revolution in Indonesia*. Cornell University Press.
- Kahin, G. M. T. (2013). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Khairiyah, S. (2025). Peran Budi Utomo dalam Perkembangan Pendidikan dan Nasionalisme. *Iic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 8260–8266. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Muhtarom, A., & Marta, L. (2024). *Perjuangan Intelektual dalam Sejarah Kebangkitan Nasional*. *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan*, 7(1), 12–27.
- Khairiyah, S. (2025). Peran Budi Utomo dalam Perkembangan Pendidikan dan Nasionalisme. *Iic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 8260–8266. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Koswara, I. (n.d.). PEMIKIRAN POLITIK HAJI SAMANHUDI DALAM MEMBENTUK SAREKAT DAGANG ISLAM. *ILMU POLITIK*.
- Kurniawati, M., Al-Qibtiyah, M., & Ajmain, M. (2025). SEJARAH BERDIRINYA SAREKAT ISLAM PADA TAHUN 1912. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(3), 4541–4548.
- Lady Andres. (n.d.). Pemberontakan PKI 1926-1927. <https://www.arahjuang.com/2020/11/12/pemberontakan-pki-1926-1927/>
- Listyawan, I., & Khoirulloh, R. W. (1926). KEGAGALAN PKI MEMBENTUK MASYARAKAT SOSIALIS DI INDONESIA PADA PEMBERONTAKAN 1926.



- Lubis, A., Setiawan, D., & Manurung, F. (2022). Pendidikan dan Kesadaran Nasional: Analisis Peran Kaum Terpelajar Pribumi. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 9(3), 121–137.
- Malik, A., Maulia, L., & Madina, S. S. (2025). Membangun Argumen Tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila , Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Dasar Negara. 3(01).
- McVey, R. T. (2019). *The rise of Indonesian communism*. Cornell University Press.
- Melisa, E., Suryadinata, R., & Pramesti, A. (2023). Evolusi Perlawanan Nasional: Dari Gerakan Kedaerahan Menuju Kesadaran Kolektif Bangsa Indonesia. *Jurnal Histori Indonesia*, 5(1), 22–36.
- Nami, N. I. B. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Gerakan Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) 1926-1927. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 1–16.
- Nasional, P., & Pni, I. (2025). PENGARUHNYA DI INDONESIA PARTAI NASIONAL INDONESIA ( PNI ): HISTORY , ROLE , AND INFLUENCE IN INDONESIA. 6078–6086.
- Nukman. (2023). Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927- 1936. SINDANG: *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 3(2). DOI:10.31540/sindang.v3i2.1127 (ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id)
- Nurhidayat Ismail, F., Fauzul Alim, F., & Ajmain, M. (2025). *Perhimpunan Indonesia Association of Indonesia*. 780–786. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Nuryadi, M. H. (2024). Politik agama di Indonesia : politisasi agama Islam dalam kontestasi pemilihan umum. 24(2), 127–140. <https://doi.org/10.21831/hum.v24i2.71424.127-140>
- Pramestuti, A. W., Rochwulaningsih, Y., & Sulistiyono, S. T. (2022). PNI Political Strategy to Win the 1955 Election in Indonesia. 6(2), 45–59.
- Pratama, I. A. (2020). Pendidikan Politik di Perguruan Tinggi : Sebuah Konsepsi Political Education in Higher Education : a Conception. 3(1), 15–22.
- PRODIKSEMA I Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial. (2025). Sejarah Pembentukan Budi Utomo Dalam Platform Timeline Dan Eclipse Crossword Sebagai Media Pembelajaran. (Diacu sebagai: PRODIKSEMA, 2025)



- Putri, A. A. (2023). Peranan Organisasi Perhimpunan Indonesia Terhadap Pergerakan Nasional Di Indonesia. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 3(2), 11–20. <https://doi.org/10.22437/jejak.v3i2.24808>
- Rachman, Y. (2022). Gerakan Buruh Indonesia Perlawanan di Era Transisi Demokrasi terhadap Neoliberalisme-Jejak Pustaka (Vol. 1). Jejak Pustaka.
- Radjab, S. (n.d.). SYARIAT ISLAM DALAM NEGARA HUKUM.
- Repositori Institusi Kemendikbud. (2025). BUDI UTOMO ; SEJARAH DAN KONGRES PERTAMA DI YOGYAKARTA 1908;, SEBUAH KAJIAN KOLEKSI MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA. (Diacu sebagai: Repositori Institusi Kemendikbud, 2025)
- Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. Soekarno. (1933). Indonesia Menggugat. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Penerbit Serambi.
- Rizqi Apriliyanti, E. (2019). *PERKEMBANGAN ORGANISASI SAREKAT ISLAM MASA KEPEMIMPINAN HAJI OEMAR SAID TJOKROAMINOTO TAHUN 1912-1930*. UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
- Rosmaida Sinaga, S., Wulandari, R., & Dewi, L. (2024). Perkembangan Pendidikan Pribumi dalam Politik Etis dan Dampaknya terhadap Pergerakan Nasional. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 14(1), 1–12.
- Rusdiana, Y. T., Heryati, H., & Yuliarni, Y. (2022). Peran Organisasi Perhimpunan Indonesia Dalam Upaya Mencapai Kemerdekaan Di Belanda. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 2(2), 54–65. <https://doi.org/10.22437/jejak.v2i2.22344>
- Saefullah, E., Saputra, T. A., & Komariyah, D. (2025). SEJARAH PNI: SEJAK BERDIRINYA HINGGA PERPECAHAN HISTORY OF PNI : FROM ITS FOUNDING TO ITS SPLIT. 5935–5942.
- Sebelas, U., & Surakarta, M. (2021). Menanamkan Nilai Persatuan Dan Kesatuan Melalui Pembelajaran Sejarah. 02(1), 37–50. <https://doi.org/10.24042/jhcc.v2i1.6486>
- Setiadhi Prakosa, Subaryana, Wagiyah, E. (2020). Peranan Dr. Sutomo Dalam Pergerakan Nasional 1908-1930. *RINONTJE: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*, 1(1), 34–45.



Strategi Politik PNI untuk Memenangkan Pemilu 1955 di Indonesia. *Indonesian Historical Studies*, 6(1). DOI:10.14710/ihis.v6i1.14043 (ejournal2.undip.ac.id)

Suryanegara, A. M. (2010). *Api Sejarah*. Bandung: Salamadani Pustaka.

Tia Rusdiana, Y. (2022). PERAN ORGANISASI PERHIMPUNAN INDONESIA DALAM UPAYA MENCAPAI KEMERDEKAAN DI BELANDA. *JEJAK Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 2(2), 54–65.

Utomo, I. N., & Supriyono, A. (2021). Bahaja Menghantjam : Ups and Downs of the New PNI Movement 1931-1942. 5(2), 148–160.

Wahidah, A. N., Handayani, F. siti, Mathar Amani, S. W., & Sujana, A. M. (2025). Dari Budi Utomo Hingga Sarekat Islam: Awal Kebangkitan Pergerakan Nasional di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 4(1), 264–281. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i1.4568>

Yamin, M. (1959). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Yayasan Prapantja.

Yansyah, A., Wawat Suryati, & Deri Ciciria. (2022). Tinjauan Historis Tentang Organisasi Indische Vereeniging dalam Sejarah Pergerakan Nasional (1908 - 1928). *Palapa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 4, 1–9. <http://eskrispi.stkipgribl.ac.id/>



# MOZAIK

## PERGERAKAN NASIONAL

Ragam Ideologi dan Organisasi Menuju  
Indonesia Merdeka  
(1908-1955)

*Mozaik Pergerakan Nasional* menghadirkan kisah perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam menemukan jati diri dan jalan menuju kemerdekaan. Buku ini menyusun potongan-potongan sejarah pergerakan nasional sejak awal abad ke-20, ketika kesadaran kebangsaan mulai tumbuh di tengah penjajahan, hingga masa pascakemerdekaan yang penuh dinamika.

Melalui pembahasan organisasi-organisasi penting seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Vereeniging, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasional Indonesia (PNI), serta peran NU dan Muhammadiyah, buku ini menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak lahir dari satu ideologi atau satu kekuatan saja. Nasionalisme Indonesia dibangun dari beragam gagasan, latar sosial, dan strategi perjuangan—mulai dari gerakan pendidikan, dakwah, politik, hingga perlawanan terbuka.

Dengan bahasa yang lugas dan naratif, buku ini mengajak pembaca memahami dinamika, perbedaan, serta kontribusi masing-masing organisasi dalam membentuk kesadaran nasional. *Mozaik Pergerakan Nasional* tidak hanya merekam peristiwa sejarah, tetapi juga mengajak pembaca melihat bagaimana perbedaan ideologi justru menjadi kekayaan dalam perjuangan bersama menuju Indonesia merdeka.

Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, mahasiswa, pendidik, serta masyarakat umum yang ingin memahami sejarah pergerakan nasional Indonesia secara utuh, kontekstual, dan inspiratif.



Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia  
Pondok Karisma Residence  
Jalan Raflesia VI D.151  
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

ISBN 978-634-239-305-5



9

786342

393055